

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Tahun 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN**

PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Jagir Wonokromo no. 358 Surabaya

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Surabaya, 19 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661117 199103 2 008

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

➤ **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Tahun 2022 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

➤ **Mekanisme Pengukuran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.

Ringkasan prestasi capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
		NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71-74	72,36*	97,78- 101,91
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	1	Indek Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,975	0,97*	99,49
		2	Indek Perlindungan Anak (IPA)	71,81	64,59*	89,95
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
		NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	4	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	1,94	97,42
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31	82,92	100,74

- Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pengarusutamaan Gender (pro-gender). Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur didukung 13 (tiga belas) program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pendaftaran Penduduk;
8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
10. Program Pengendalian Penduduk;
11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS);
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :
 - Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang;
 - Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
 - Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A Struktur Organisasi	1
	B Tugas dan Fungsi	2
	C Isu Strategis	3
	D Cascading Kinerja	7
	E Peta Proses Bisnis	20
	F Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	22
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	23
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	
	A Capaian Kinerja Organisasi	26
	B Realisasi Anggaran	52
	C Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	61
BAB IV	: PENUTUP	62
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
A.	Form Pendanaan Indikatif pada Renstra	
B.	Perjanjian Kinerja	
C.	Rekapitulasi Data	
D.	Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD 2019-2024)	
E.	Peta Proses Bisnis	

BAB I PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

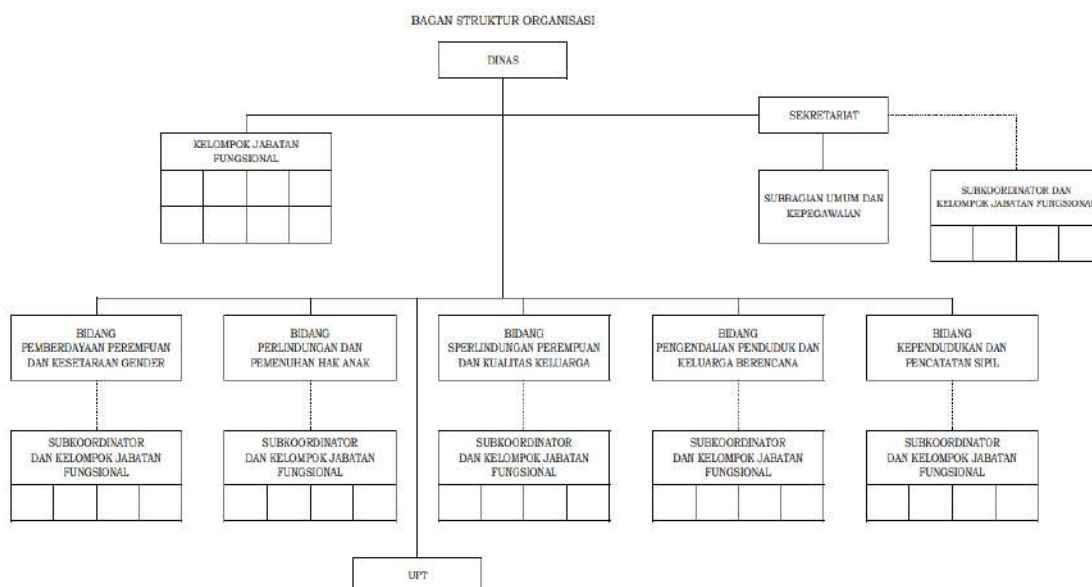
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Bab III pasal 3 poin 9 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :

- a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Kantor DP3AK Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Surabaya, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Dalam melaksanakan 3 urusan, DP3AK Provinsi Jawa Timur dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) UPT yaitu : (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender; (2) Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak; (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga; (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta 1 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021)



Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur membawahi :

- **Sekretariat**, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender** terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak** terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga** terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil** terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- **UPT Perlindungan Perempuan dan Anak**

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Pasal 19 pada Pergub 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AK maka SOTK ini mulai berlaku setelah pelantikan pejabat struktural yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022.

C. ISU STRATEGIS

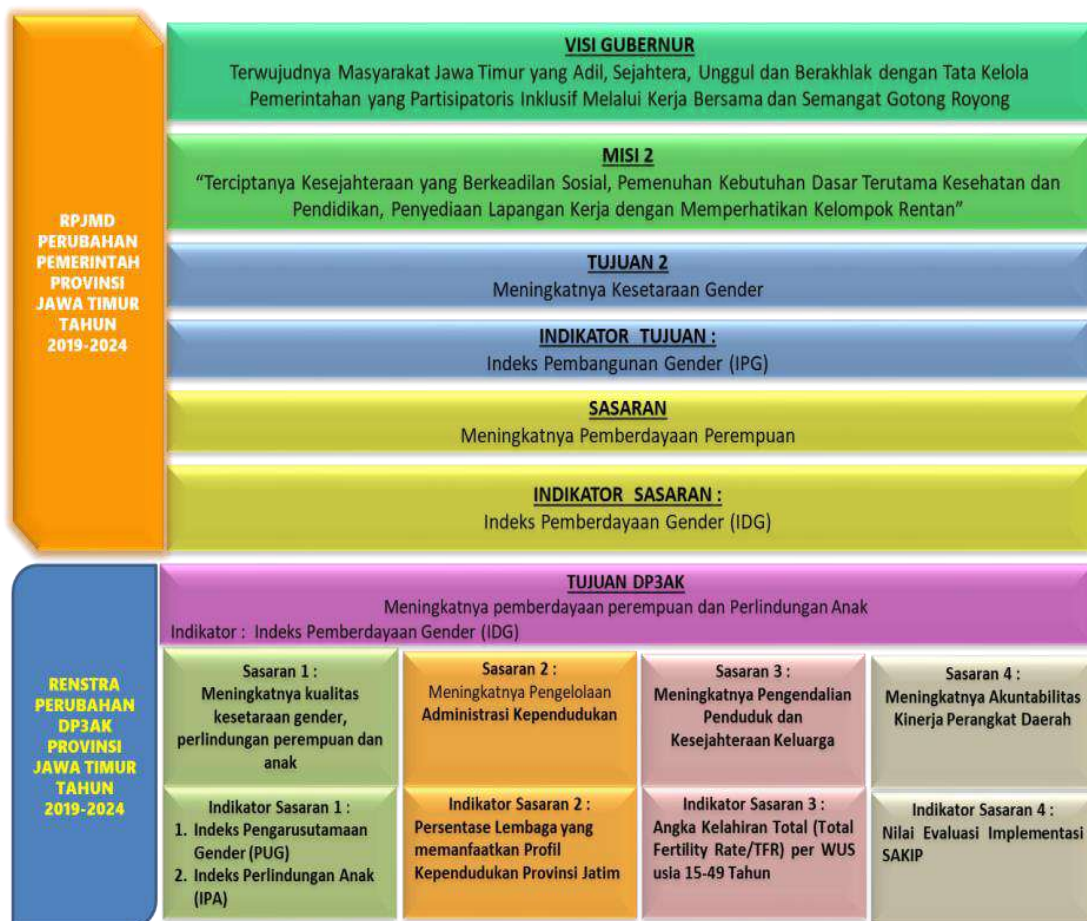
Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Belum optimalnya integrasi gender dalam pembangunan;
2. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya pemenuhan hak anak;
3. Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam politik dan ekonomi;
4. Akurasi database Kependudukan yang Menjadi Kewenangan Provinsi;
5. Tingginya angka pernikahan usia anak dan stunting;
6. Pertumbuhan Penduduk Tinggi.

D. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja ini untuk memberikan gambaran keterhubungan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 DP3AK Provinsi Jawa Timur



Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator Sasaran 1:

1. **Indeks Pengarustamaan Gender (PUG)**
2. **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

IK :

1. **Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender**
2. **Persentase ARG Jawa Timur**
3. **Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan**

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

IK : Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan

PROGRAM KUALITAS KELUARGA

IK : **Persentase kebijakan kualitas keluarga yang dikeluarkan**

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

IK : **Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak**

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

IK : **Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

IK : Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :

Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jatim

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

IK : **Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan pendaftaran kependudukan sesuai standar**

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

IK : **Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)**

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

IK : **Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim**

Sasaran 3:
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Sasaran 3 :
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

**PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA**

IK : Persentase Mitra
Organisasi Kemasyarakatan di
Jawa Timur yang telah
mendapatkan pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
keluarga

**PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK**

IK : Persentase
Kab/Kota yang
telah
melaksanakan 5
pilar dalam GDPK

**PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA**

IK : Persentase
jumlah kesertaan
KB aktif (CPR)

Sasaran 4 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

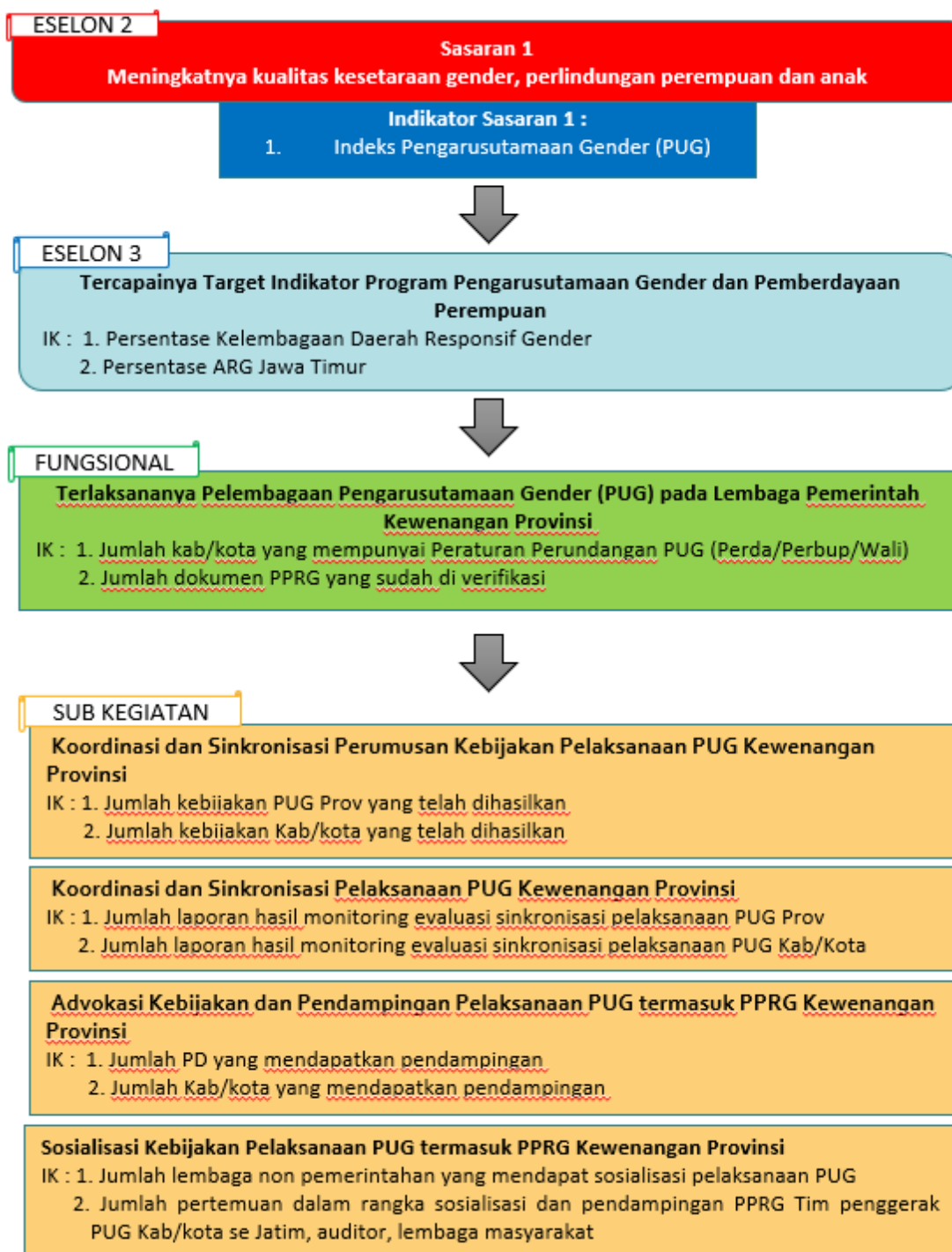
Indikator Sasaran 4:
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

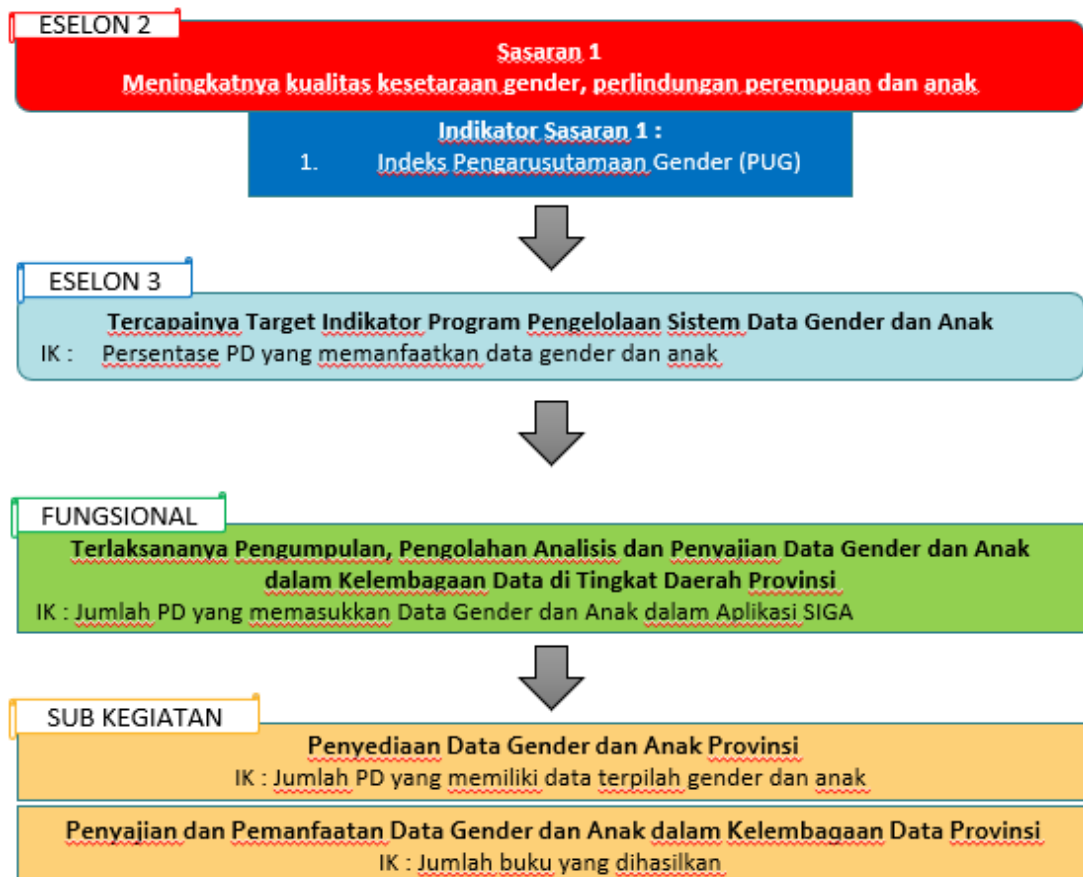
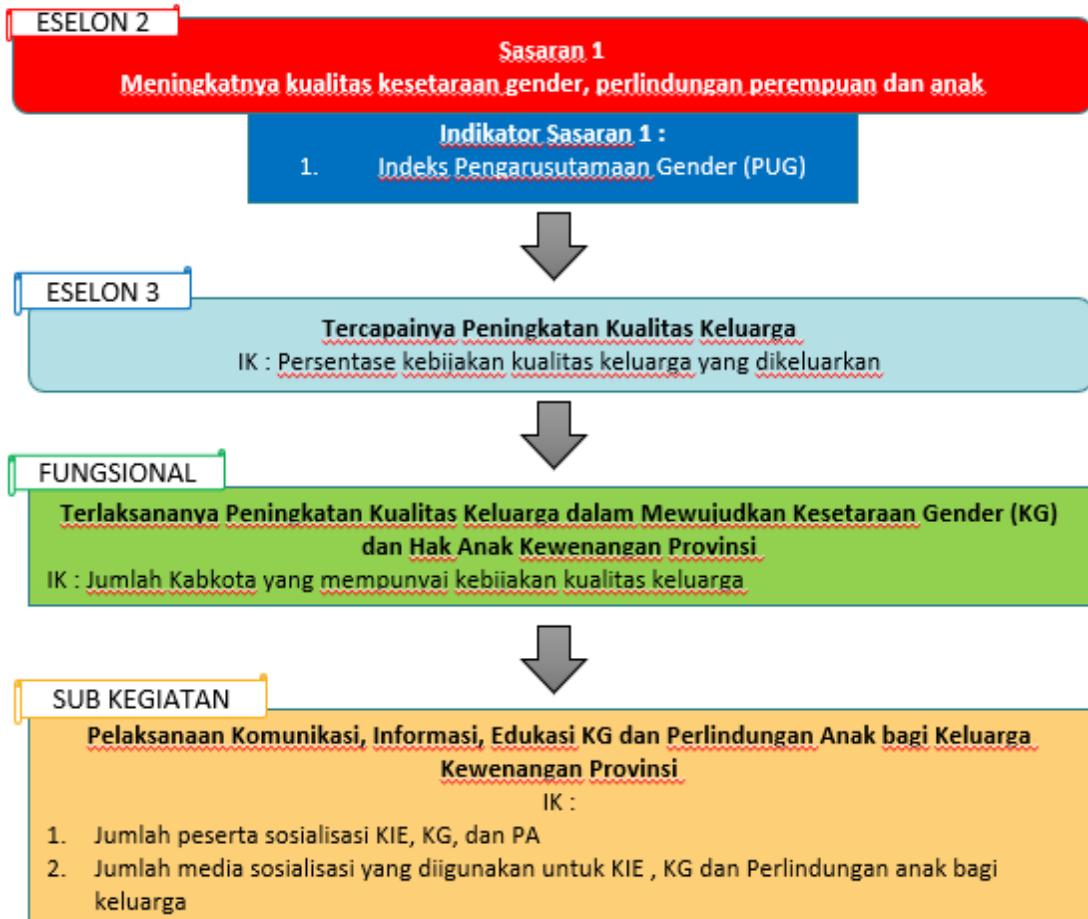
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

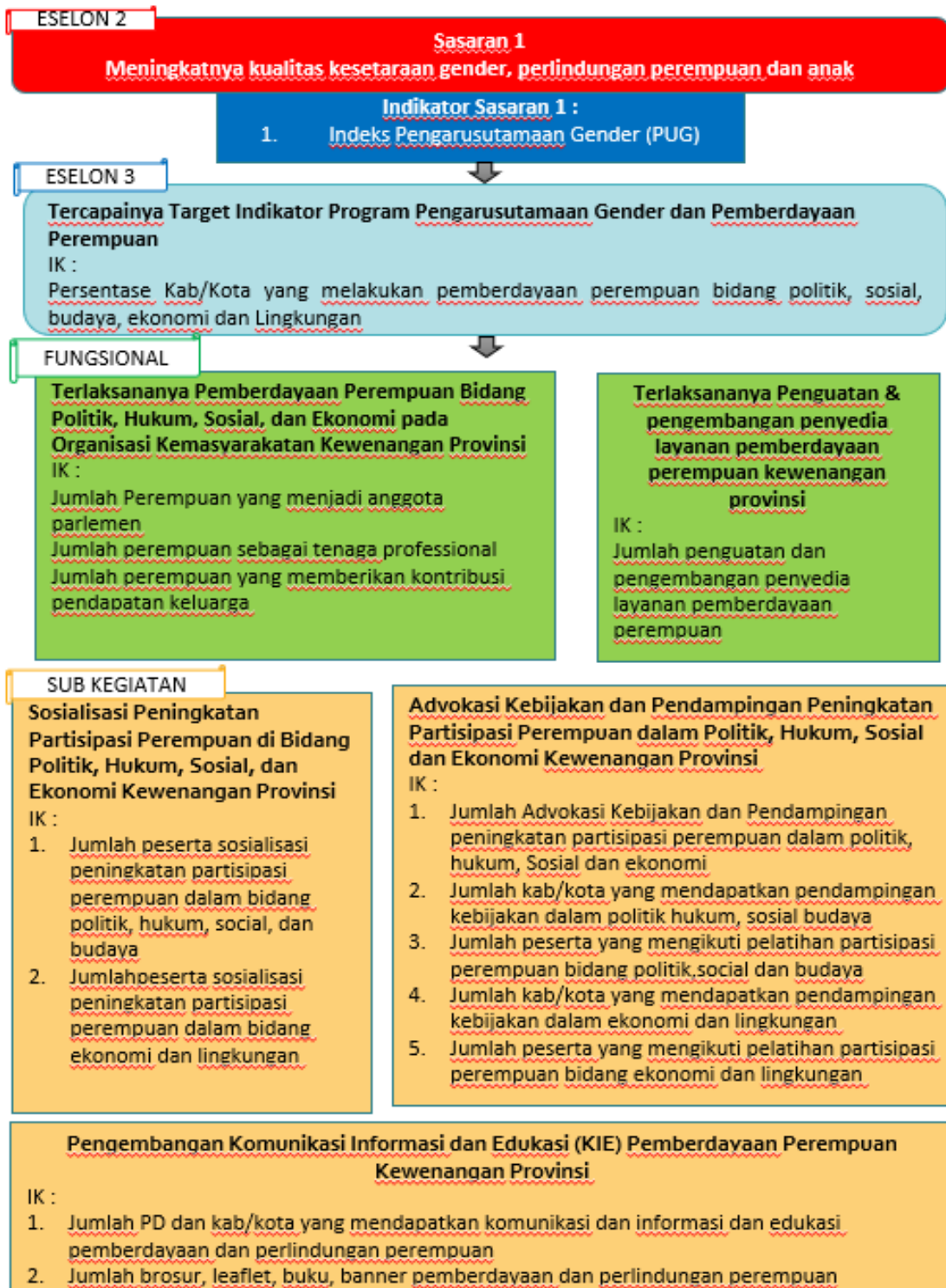
IK :

1. Persentase indikator program yang tercapai
2. Persentase realisasi anggaran
3. Indeks profesionalitas ASN

CASCADING KINERJA PER SASARAN







ESELON 2

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :

1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Perempuan

IK : Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah kerjasama penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan para pihak penyedia layanan

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang tertangani

Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan dan TPPO terhadap perempuan

Penyediaan Layanan Penaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah PD/Kab/Kota yang mempunyai sarana prasarana layanan perempuan korban kekerasan yang sesuai dengan SOP

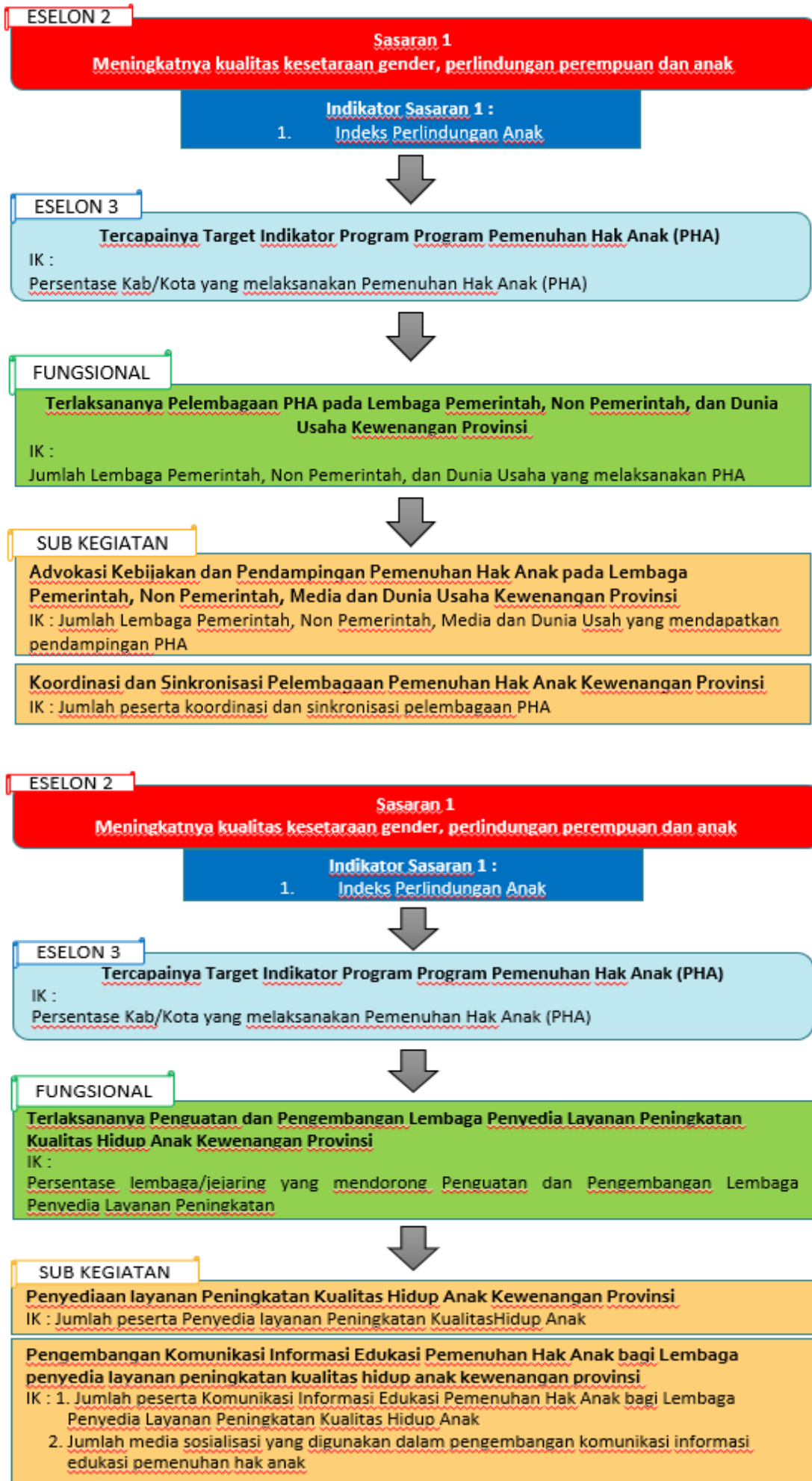
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM Penyedia Layanan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta Advokasi kebijakan layanan perlindungan perempuan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah kebutuhan spesifik yang tercukupi bagi perempuan
Jumlah pelatihan spesifik perempuan yang terlaksana

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah peserta penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan



ESELON 2

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :
1. Indeks Perlindungan Anak

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Khusus Anak
IK :
Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak
Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara konferensif

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK :
Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
IK : Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan peneaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Terlaksananya Penguatan dan Penoembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK :
Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak

SUB KEGIATAN

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak
Jumlah kab/kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak

Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
IK : Jumlah jenis layanan yang tersedia

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah jenis layanan yang tersedia

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi IK : Jumlah sarpras yang sudah tersedia (UPT PPA Provinsi)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta sosialisasi terkait KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus
Jumlah media social yang dihasilkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi IK : Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM
Jumlah sarpras kab/kota yang sudah terdata

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
IK : Jumlah jejaring / lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi IK : Jumlah jejaring penyedia layanan anak yang aktif

ESELON 2

Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :
Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Pendaftaran Penduduk

IK :
Persentase Perekaman KTP Elektronik
Persentase kartu Identitas Anak (KIA)

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

IK :
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan pendaftaran kependudukan sesuai standar

SUB KEGIATAN

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional

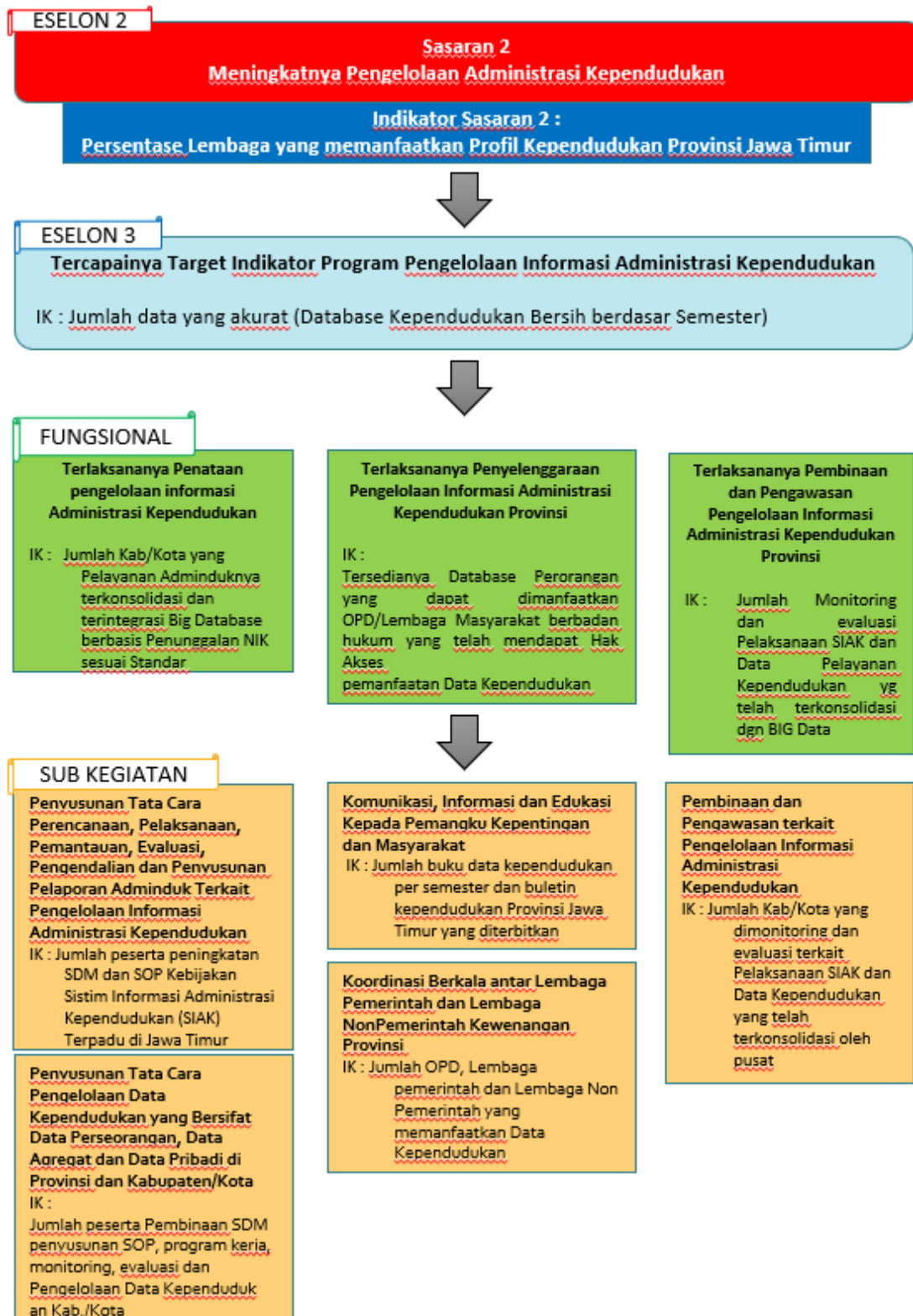
IK : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional
Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan system administrasi kependudukan

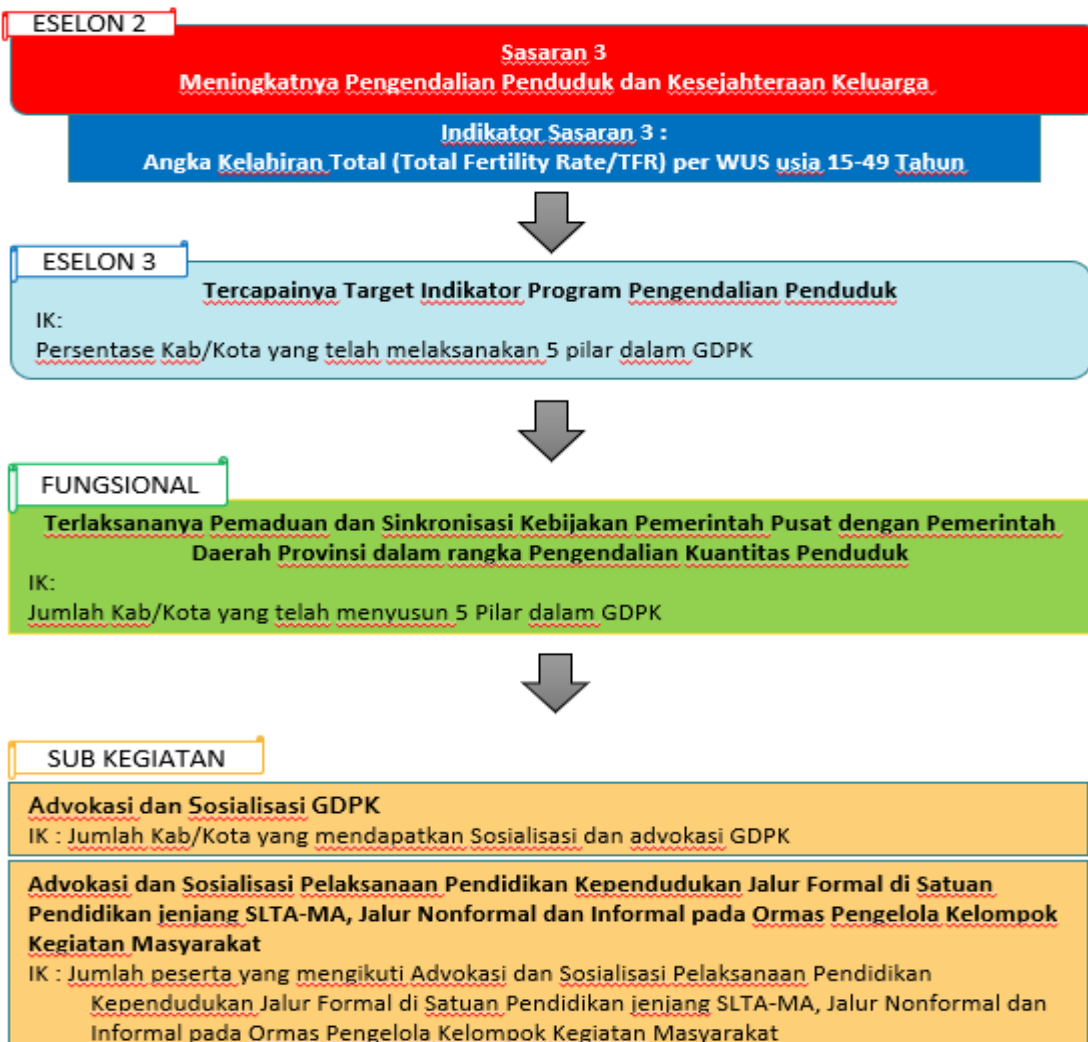
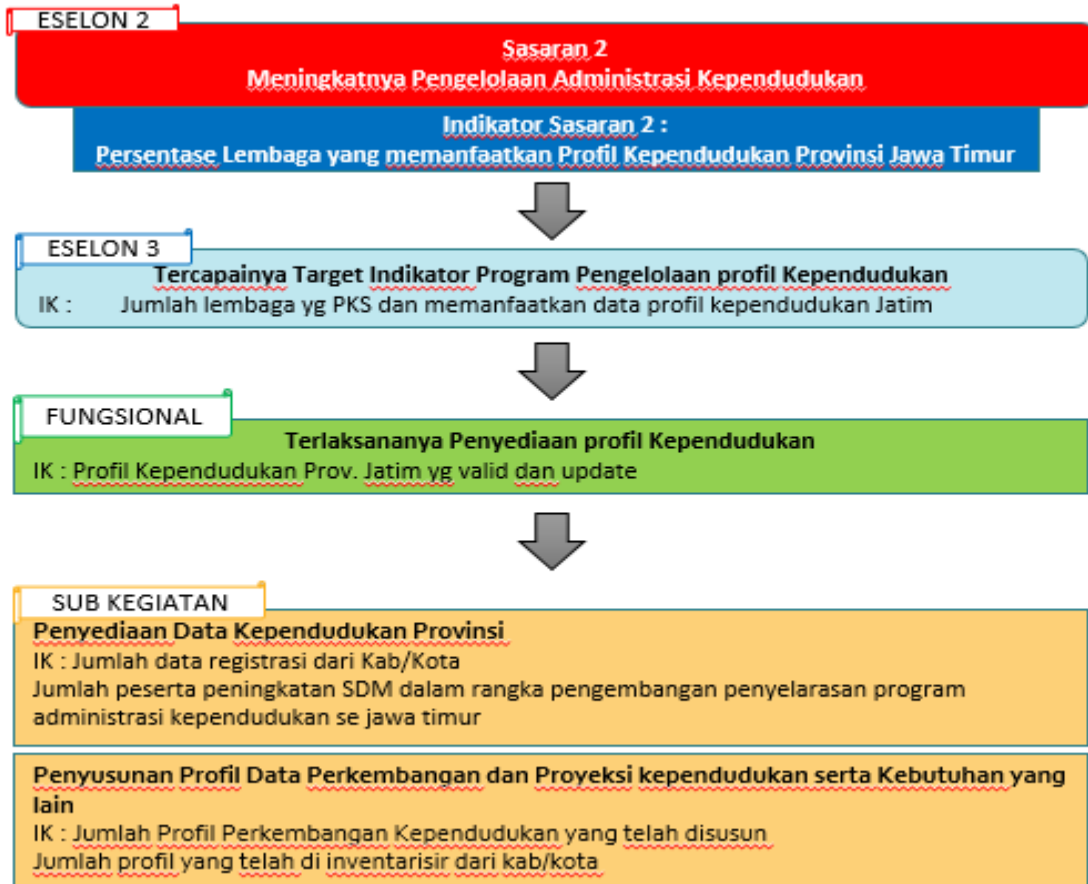
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

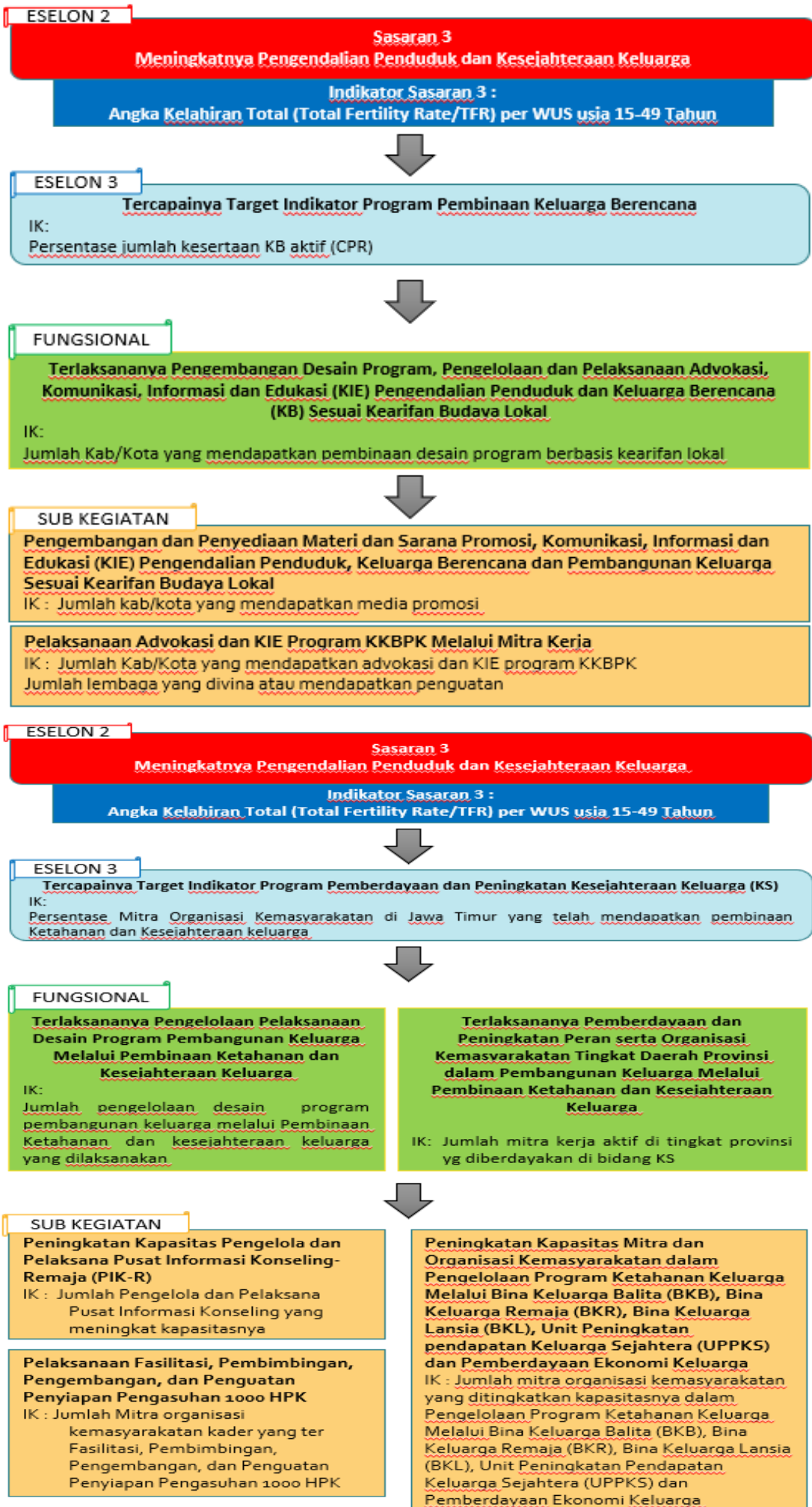
IK : Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah kab/koya yang mengikuti peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk se jawa timur

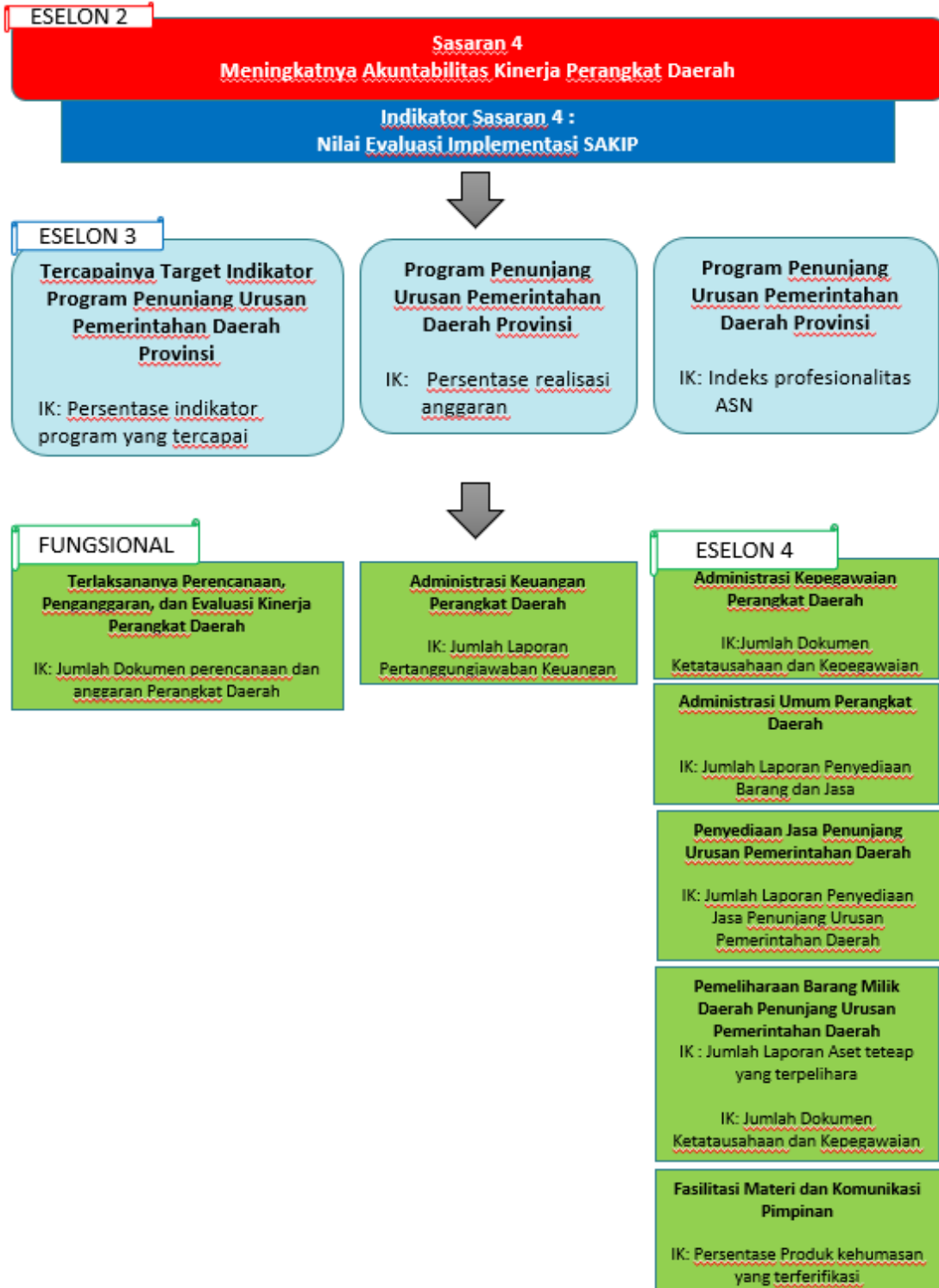
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk

IK : Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur









Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 IK: Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 IK : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 IK : Jumlah dokumen DPA perubahan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 IK : Jumlah dokumen RKA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 IK : Jumlah dokumen capaian kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 IK Jumlah dokumen perubahan RKA

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 IK : Jumlah dokumen evaluasi kinerja

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 IK : Jumlah dokumen DPA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 IK: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 IK : Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 IK : jumlah dokumen keuangan SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 IK : jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 IK : Jumlah dokumen tanggapan atas LHP

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 IK : Jumlah laporan verifikasi penatausahaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 IK : Jumlah laporan keuangan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 IK : jumlah laporan akuntansi perangkat daerah

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 IK : jumlah laporan prognosis

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 IK: Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 IK : jumlah pengadaan pakaian dinas

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 IK : jumlah laporan SKP

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 IK : jumlah laporan data pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 IK : jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah
 IK: Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Bahan/Material
 IK : jumlah paket pengadaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu
 IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 IK : jumlah paket pengadaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 IK : jumlah laporan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 IK : jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 IK : jumlah jasa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 IK : Jumlah Laporan Aset tetap yang terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 IK : jumlah jasa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 IK : jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung, kantor dan bangunan lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 IK : jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 IK : jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 IK : jumlah pemeliharaan aset tak berwujud

Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 IK: Persentase Produk kehumasan yang terferifikasi

Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
 IK : jumlah hasil olah konten dokumentasi kegiatan kepala dinas

E. PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menangani 3 urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun proses bisnis untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tentang Perjanjian Kinerja sudah dibuat, tetapi ada capaian kinerja yang belum tercapai
2. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti.
3. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja.
4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
5. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
6. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 tertuang dalam Renstra Perubahan tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022 dan melaporkannya dalam LKjIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

Pada Tahun 2022, DP3AK Provinsi Jawa Timur melaksanakan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator
Perubahan Renstra Tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi				Target	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,04	73,03	72,36	72,36*	71,77	72,17
								71-74*	71-74*	
			Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks	-	0,93	0,97	0,97*	0,96	0,97
								0,977*	0,979*	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,80	72,25	64,59	64,59*	71,85	71,90	
								72,50*	72,75*	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,28	2,29	2,21	1,94	1,86	1,83		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	81,30	82,15	82,16	82,92	82,39	82,47		

Catatan : *) pada target IDG, PUG dan IPA, berdasarkan Rancangan perubahan ke 2 Renstra Tahun 2019-2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis Tahun 2022 didukung dengan pagu anggaran P-APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 33.632.994.197,-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,975	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3.192.294.600
			2. Program Perlindungan Perempuan	1.793.258.120
			3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	12.148.000
			4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	591.618.800
	5. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,81	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.080.880.000
			2. Program Perlindungan Khusus Anak	1.352.825.918
2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3. Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	1. Program Pendaftaran Penduduk	653.624.377
			2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	880.464.630
			3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	295.443.890
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	4. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	1. Program Pengendalian Penduduk	599.835.000
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	270.895.000
			3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	459.900.000
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.449.805.862

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai dengan 100%	Baik
3	55% sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tujuan :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71-74	72,36*	97,78-101,91

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2022 adalah Data Tahun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71-74 dan realisasi tahun 2022 sebesar 72,36*, tingkat capaian sebesar 97,78%-101,95% atau tercapai. Target IDG tahun 2022 mengalami perubahan semula 71,37 menjadi 71-74 sebagai masukan target dari BPS dan tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2022.

Data realisasi tahun 2022 masih menggunakan data IDG tahun 2021 yang bersumber dari BPS, dikarenakan data tahun 2022 dari BPS masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2023.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional
3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2020-2024 serta Perubahan RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; dimudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71-74	73,03	72,36	72,36*

Realisasi IDG di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 73,03. Sedangkan pada Tahun 2021 realisasi IDG sebesar 72,36, lebih rendah 0,67 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2020.

Tabel Komponen Pendukung IDG Jawa Timur

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	2	3	4	5
2019	18,33	48,90	35,68	73,04
2020	18,33	49,65	35,81	73,03
2021	17,50	50,73	35,72	72,36

Sumber data : BPS Prov Jatim

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 18,33%. Komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 17,50. Hal ini disebabkan adanya pergantian antar waktu anggota parlemen perempuan digantikan oleh laki-laki. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen di Jawa Timur pada tahun 2021 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,89%.
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2020 sebesar 49,65% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 50,73%. Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 1,08 poin. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Jawa Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 49,99%.
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2020 sebesar 35,81% dan pada tahun 2021 menurun menjadi 35,72%. Komponen ini mengalami penurunan sebesar 0,09 poin jika dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemi covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi global sehingga banyak terjadi pemutusan

hubungan kerja termasuk tenaga kerja perempuan. Komponen Sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Timur lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional sebesar 37,22%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada 1 (satu) komponen dan penurunan pada 2 (dua) komponen menyebabkan IDG Jawa Timur tahun 2021 mengalami penurunan.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing Kab/Kota bervariasi bahkan banyak Kab/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingka provinsi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2021

No	Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	Pacitan	15,56	46,45	39,43	70,45
2	Ponorogo	13,33	54,15	35,99	67,63
3	Trenggalek	6,67	56,74	38,05	61,43
4	Tulungagung	12,00	60,80	38,16	65,06
5	Blitar	24,00	56,51	39,90	79,68
6	Kediri	22,00	56,45	31,21	71,64
7	Malang	22,00	49,21	37,12	76,69
8	Lumajang	16,00	50,92	23,98	59,38
9	Jember	16,00	46,55	31,19	66,16
10	Banyuwangi	26,00	47,70	31,37	74,84
11	Bondowoso	13,33	38,75	37,17	65,35
12	Situbondo	31,11	49,66	27,36	73,60
13	Probolinggo	26,00	49,77	25,42	68,75
14	Pasuruan	12,00	57,47	35,21	65,75
15	Sidoarjo	16,00	51,30	29,77	67,10
16	Mojokerto	28,57	50,92	35,01	80,20
17	Jombang	28,00	54,40	28,17	73,76
18	Nganjuk	26,00	47,20	25,64	69,78
19	Madiun	22,22	59,18	30,23	68,97
20	Magetan	15,56	55,54	38,33	70,50
21	Ngawi	22,22	52,93	32,32	71,33
22	Bojonegoro	10,00	48,78	26,68	56,14
23	Taban	14,00	58,80	31,00	63,51
24	Lamongan	24,00	47,66	33,46	74,05
25	Gresik	20,41	48,48	31,41	71,48
26	Bangkalan	8,00	41,50	36,03	60,03
27	Sampang	6,67	42,68	30,82	55,67
28	Pamekasan	4,44	35,00	34,22	52,44
29	Sumenep	8,33	42,47	36,94	61,79
30	Kota Kediri	36,67	47,48	35,46	84,17
31	Kota Blitar	12,00	50,71	39,11	68,60
32	Kota Malang	26,67	57,80	34,69	77,63
33	Kota Probolinggo	13,33	46,77	31,09	65,05
34	Kota Pasuruan	3,33	47,13	31,84	54,94
35	Kota Mojokerto	16,00	59,56	37,35	70,68
36	Kota Madiun	23,33	55,13	37,65	76,75
37	Kota Surabaya	32,00	49,99	35,83	82,82
38	Kota Batu	16,67	49,51	30,05	68,80
Jawa Timur		17,50	50,73	35,72	72,36
Indonesia		21,89	49,99	37,22	76,26

Sumber data : BPS Prov Jatim

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra*	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,17*	72,36*	100,30%
			71-74**		

Catatan : *) Renstra yang digunakan Perubahan Pertama Renstra 2019-2024

**) Rancangan Akhir Perubahan ke 2 Renstra tahun 2019-2024

Jika capaian IDG tahun 2022 sebesar 72,17 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 72,39, maka tingkat kemajuannya sebesar 100,30%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,36	76,26	-3,9



Pada Tahun 2021, angka IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 72,36 lebih rendah 3,9 poin dari angka IDG Nasional sebesar 76,26. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen, dimana Provinsi Jawa Timur sebesar 17,50% lebih rendah 4,39 poin dari Nasional yaitu sebesar 21,89%. Selain itu, sumbangan pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar 35,72, lebih rendah dari nasional sebesar 37,22.

Dalam rangka peningkatan pencapaian indikator kinerja IDG, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui pelatihan dalam bidang ekonomi, peningkatan kapasitas politik, meningkatkan kerja sama dengan organisasi wanita dan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 diukur melalui indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,975	0,97*	99,48
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,81	64,59*	89,95

Catatan : *) Realisasi IPA dan PUG tahun 2022 adalah Data Tahun 2021

Capaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,975 dan realisasinya sebesar 0,97* tingkat capaian sebesar 99,48%. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) masih di tahun 2021 dikarenakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tidak melaksanakan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya di tahun 2022 sebagai komponen pelaksanaan PUG. Indeks PUG disusun berdasarkan pelaksanaan 7 (tujuh) Prasyarat PUG yang dicapai Provinsi Jawa Timur. Hasil penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Jawa Timur mendapatkan Kategori tertinggi yaitu Kategori Mentor, penghargaan ini juga dinilai dari 7 (tujuh) Prasyarat PUG, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan 7 (Tujuh) Prasyarat PUG

NO	ASPEK	PELAKSANAAN
1	Komitmen	1. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 39 tanggal 13 Juli 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

		<p>3. Rencana Pencapaian PUG di Provinsi dan Kabupaten Kota dengan memberikan arahan atau petunjuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan PUG:</p> <p>a. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor:300/145.1/109.4/2022 tanggal 8 Februari 2022 Perihal : Penanganan Masalah Perempuan, Anak dan Keluarga yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se Jawa Timur (pada Poin ke 4 yaitu Menyusun Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi Responsif Gender dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di APBD Kab/Kota setiap tahun untuk mendorong peningkatan kinerja IPM Terpilah Laki dan Perempuan, IPG dan IDG);</p> <p>b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 474.24/506/109.2/2022 Tanggal 18 April 2022 Perihal Anggaran Responsif Gender (ARG) Th. 2023 yang ditujukan kepada Direktur RS/Kepala UPT BLUD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur.</p>
2	Kebijakan	<p>RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 telah memuat kebijakan yang responsif gender antara lain yang tercantum pada:</p> <p>a. Dasar hukum memuat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan salah satunya adalah urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak dengan 6 sub urusan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun</p>

		<p>2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).</p> <p>b. Data terpilah memuat Persebaran Penduduk berdasarkan jenis kelamin, Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama dan jenis kelamin, Kondisi ketenagakerjaan menurut jenis kelamin.</p> <p>c. Isu strategis yang responsif gender memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Sumberdaya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan. Dalam Isu ini dibahas tentang IPM dan permasalahan tentang pendidikan yang belum merata dan permasalahan kesehatan AKI, AKB dan stunting yang masih cukup tinggi. • Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan kesejahteraan masyarakat dengan isu kemiskinan yang belum terselesaikan, disparitas desa dan tingkat pengangguran. • Salah satu permasalahan demokrasi kewargaan adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang terdiri dari beberapa isu gender isu yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya akses , partisipasi serta kesempatan perempuan sebagai pengambil keputusan , perempuan dalam politik dan peminggiran ekonomi perempuan ; b) Masih banyaknya kasus Trafficing dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ; c) Masih tingginya perkawinan anak ; d) Belum semua Kab/Kota membentuk UPT PPA; 5)
--	--	---

		<p>Kurang sinergisme antar sektor dalam mendukung PUG dan perlindungan anak.</p> <p>d. Program dan Kegiatan yang responsif gender yang telah di analisis dengan alat analisis GAP, GBS dan TOR .</p> <p>e. Indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan yaitu indikator kinerja utama (IKU) Gubernur Jawa Timur adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).</p> <p>f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62/KPTS/013/2022 tentang Forum Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.</p> <p>g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/169/KPTS/013/2022 tentang Penerima Hibah Yang Dievaluasi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.</p> <p>i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/235/KPTS/013/2022 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.</p> <p>j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/283/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Periode Tahun 2022-2024.</p>
--	--	---

		<p>k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/371/KPTS/013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.</p> <p>l. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/380/KPTS/013/2022 tentang Sub Kluster Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.</p> <p>m. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/710/KPTS/013/2022 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/371/013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.</p>
3	Kelembagaan	<p>a. Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 188/118/KPTS/013/2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Jawa Timur</p> <p>b. Keputusan Gubernur Jawa Timur No:188/119/KPTS/13/2020 Tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. Keputusan Kepala Dinas P3AK Nomor : 188/29/109.2/Kep/2020 tentang Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Prov Jawa timur Tahun 2020</p> <p>d. Jumlah Perangkat Daerah yang telah membentuk SK Focal Poin adalah sebanyak 65 Perangkat Daerah atau 100%</p> <p>e. Rencana pencapaian PUG Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun</p>

		<p>2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024</p> <p>f. Jawa Timur juga sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melalui Pergub No. 1 Tahun 2021 tentang UPT PPA DP3AK</p>
4	Sumberdaya	<p>a. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang terlatih PPRG sebanyak 65 orang atau 100% 2. Auditor yang terlatih PUG PPRG sebanyak 3 orang. 3. Tenaga Fasilitator berjumlah 22 orang berdasarkan SK Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Nomor : 474.24/60/Kep/109.2/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Forum Fasilitator PUG dan PPRG Provinsi Jawa Timur <p>b. Anggaran yang Responsif Gender 2022 sebesar Rp. 7.627.635.118.208,- (51%) dari nilai total anggaran APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2022 (diluar Belanja Pegawai dan Belanja Modal) sebesar Rp. 14.871.414.292.239,-</p>
5	Data Terpilah dan Sistem Informasi	<p>a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/529/KPTS/013/2018 Tentang Forum Data Terpilah Provinsi Jawa Timur. Dalam forum data tersebut terdapat lembaga di luar perangkat daerah yaitu: BPS dan Lembaga Masyarakat yang berjejaring.</p> <p>b. Buku statistik/profil gender yang telah di keluarkan adalah: Buku Saku Data Gender Tahun 2022</p> <p>c. Sistem Informasi yang ada :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. https://satu.jawa timurprov.go.id/sektoral/view/jumlah-bayi. 2. https://bidppp.dp3ak.jawa timurprov.go.id 3. Insta Gram : dp3akjawa timur.official5 4. Website : http://dp3ak.jawa timurprov.go.id 5. Aplikasi PPRG SUPERSINDEN : https://pprg.dp3ak.jatimprov.go.id/
6	Alat, Pedoman dan Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan PPRG secara rutin setiap tahunnya di setiap Perangkat Daerah menggunakan GAP , GBS dan TOR 2. Buku Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Jawa Timur 3. Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bagi Desa 4. Modul Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Jawa Timur 5. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur No. 188.4/974/060/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6. Alat analisis yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah GAP, GBS dan TOR.
7	Daftar Lembaga Jejaring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur 188/219/109.4/2019 Tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan

		<p>Anak (PUSPA) "GAYATRI" di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019</p> <p>a. Lembaga Masyarakat yang berjejaring dengan Provinsi Jawa Timurr dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak adalah: Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Timur (081259359175), Woman Crisis Centre Jombang (085735035352), Woman Crisis Centre Savy Amira Sahabat Perempuan, Woman Crisis Centre Dian Mutiara Malang, Woman Crisis Centre Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban, Woman Crisis Centre Nganjuk, Woman Crisis Centre Pattiro Gresik, Woman Crisis Centre Asosiasi Perempuan Lamongan, PW Muslimat NU Jawa Timur, Fatayat NU Jawa Timur, PW Aisyah Jawa Timur, TP PKK Provinsi Jawa Timur, Wanita Katolik Republik Indonesia, BKOW Jawa timur, IWAPI, WCC Layanan BerbasisKomunitas Jombang, Lembaga Layanan Psikologi Geofira, LBH Tiara Yustisda, Rihlah Cahaya Bangsa Kediri, Yayasan Embun, Puspa, Satgas PPA, Apsifor Jawa Timur, Perwita Wana Lencana, Kopatura Malang.</p>
--	--	---

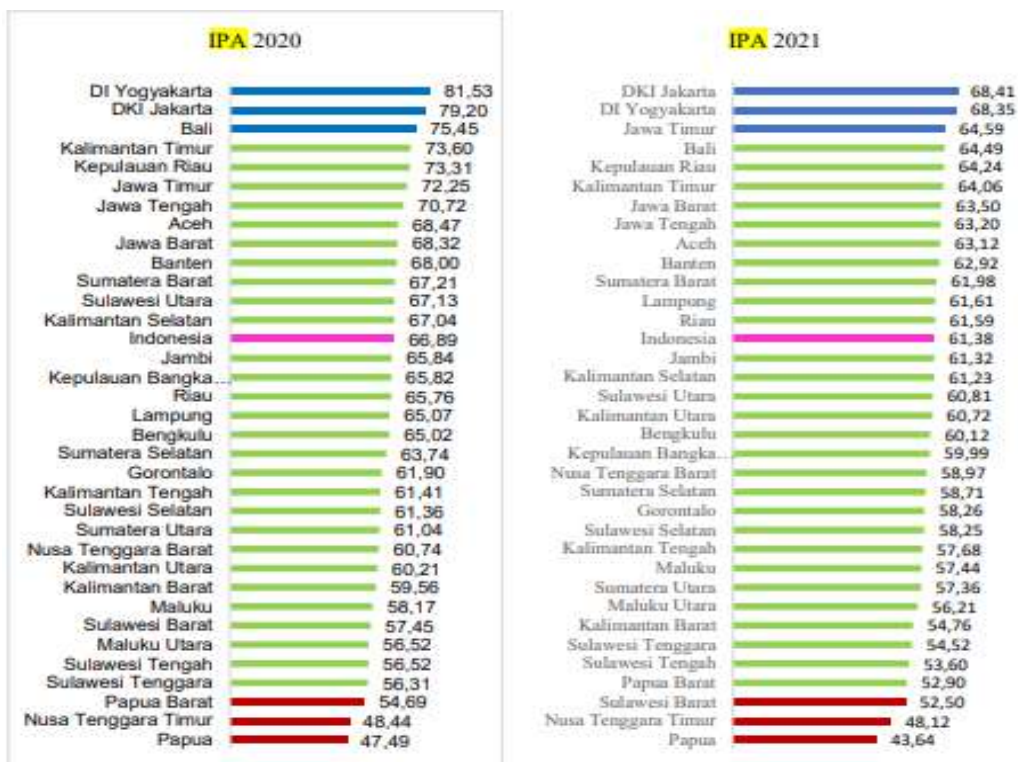
Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,81 dan terealisasi sebesar 64,59*, dengan tingkat capaian sebesar 89,94%. Dengan rincian variable Indeks Perlindungan Anak yang capaiannya sebagaimana berikut :

No	KLASTER	TAHUN	
		2020	2021
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	63,49	49,13
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	79,09	79,05
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	78,29	78,29
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	78,29	34,18
5	Klaster V Perlindungan Khusus	74,65	77,03

Sumber data : BPS dan KPPPA

Penurunan realisasi IPA disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat tidak terkecuali anak-anak sehingga pada klaster I Hak Sipil dan Kebebasan serta Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya capaian tahun 2021 turun drastis dibanding tahun 2020. Penurunan capaian IPA tidak hanya terjadi pada Provinsi Jawa Timur akan tetapi seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA yang bekerja sama dengan BPS sebagaimana berikut :

Capaian Indeks Perlindungan Anak menurut Provinsi, 2020-2021



Sumber data : BPS dan KPPPA

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,975	0,94	0,97	0,97*
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,81	72,25	64,59	64,59*

Catatan : Target PUG mengalami perubahan pada perubahan renja tahun 2022 yang semula 0,95

Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Tahun 2021 sebesar 0,97, lebih tinggi 0,03 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,94. Sedangkan pada Tahun 2022 masih menggunakan data 2021.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun 2022 sebesar 64,59*. Data realisasi Tahun 2022 masih menggunakan data IPA Tahun 2021 yang bersumber dari Kementerian PPPA RI, dikarenakan data Tahun 2022 masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada tahun 2023.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra*	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,97*	0,97*	100%
			0,979**		
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,90*	64,59*	89,83%
			72,75**		

*Catatan : *) Target merupakan Perubahan Pertama Renstra DP3AK Tahun 2019-2024*

****) Target merupakan Rancangan Akhir Perubahan kedua Renstra DP3AK Tahun 2019-2024*

Capaian Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2022 sebesar 0,97 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,97, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022 sebesar 64,59* dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 71,90, target atau tingkat kemajuannya sebesar 89,83%.

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Standar Nasional**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,97	-	-
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,59*	61,38*	-3,21

Catatan : *) Realisasi IPA dan PUG tahun 2022 adalah Data Tahun 2021

Pencapaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2022 tidak lepas dari komitmen Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan 7 (tujuh) Prasyarat Gender di Jawa Timur. Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan predikat MENTOR. Sedangkan seluruh Kab/Kota di Jawa Timur juga mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan berbagai predikat.



Jawa Timur mendapatkan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan predikat MENTOR yang diserahkan pada Tahun 2020.

Dan 38 kab/kota terdapat 28 kab/kota yang mengalami peningkatan dan 1 kota yang mengalami penurunan.

Tahun 2021 terdapat:

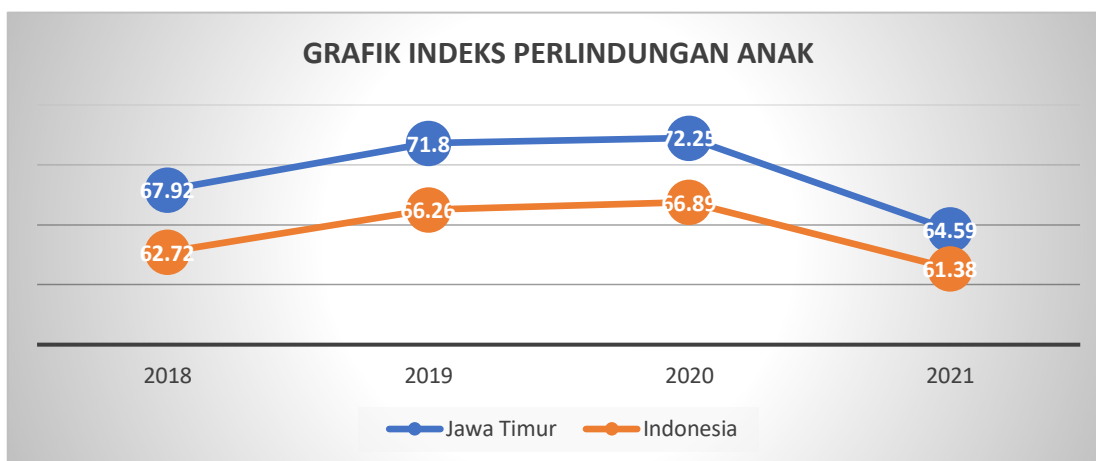
- 8 kab/kota mendapatkan penghargaan APE kategori Pratama
- 16 kab/kota mendapatkan penghargaan APE kategori Madya
- 13 kab/kota mendapatkan penghargaan APE kategori Utama
- 1 Kota mendapatkan penghargaan APE kategori Mentor

Sebagai Perwujudan Komitmen Kesetaraan Gender Telah Tersusun Perda Jatim No 9 Tahun 2019 Tentang PUG yang saat ini sudah diikuti 15 Kab/Kota Yang sudah menyusun Perda Kab/Kota

**PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2020
MENDAPAT PENGHARGAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA**

No	Kabupaten/Kota	Kategori APE	No	Kabupaten/Kota	Kategori APE
1	KAB. PACITAN	Pratama	20	KAB. MAGETAN	Madya
2	KAB. PONOROGO	Madya	21	KAB. NGAWI	Utama
3	KAB. TRENGGALEK	Utama	22	KAB. BOJONEGORO	Utama
4	KAB. TULUNGAGUNG	Utama	23	KAB. TUBAN	Madya
5	KAB. BLITAR	Utama	24	KAB. LAMONGAN	Madya
6	KAB. KEDIRI	Pratama	25	KAB. GRESIK	Utama
7	KAB. MALANG	Utama	26	KAB. BANGKALAN	Pratama
8	KAB. LUMAJANG	Pratama	27	KAB. SAMPANG	Pratama
9	KAB. JEMBER	Pratama	28	KAB. PAMEKASAN	Madya
10	KAB. BANYUWANGI	Madya	29	KAB. SUMENEP	Madya
11	KAB. BONDOWOSO	Pratama	30	KOTA KEDIRI	Madya
12	KAB. SITUBONDO	Madya	31	KOTA BLITAR	Madya
13	KAB. PROBOLINGGO	Utama	32	KOTA MALANG	Pratama
14	KAB. PASURUAN	Utama	33	KOTA PROBOLINGGO	Utama
15	KAB. SIDOARJO	Madya	34	KOTA PASURUAN	Madya
16	KAB. MOJOKERTO	Madya	35	KOTA MOJOKERTO	Madya
17	KAB. JOMBANG	Utama	36	KOTA MADIUN	Madya
18	KAB. NGANJUK	Madya	37	KOTA SURABAYA	Mentor
19	KAB. MADIUN	Utama	38	KOTA BATU	Utama

Grafik Indeks Perlindungan Anak Tahun 2018-2021



Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2018, 2019, dan 2020 Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. IPA Provinsi Jawa Timur berada di atas IPA Nasional. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 64,59 dikarenakan kondisi pandemic covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat termasuk anak-anak sehingga terdapat 2 klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, serta hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang mempengaruhi capaian IPA Jawa Timur. Walaupun demikian, capaian Jawa Timur masih tetap diatas nasional yang capaiannya 61,38. Terkait dengan perolehan penghargaan Provinsi Layak Anak, Provinsi Jawa Timur berhasil untuk tetap mempertahankan predikat sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) di tahun 2022. Demikian juga, seluruh Kab/Kota di Jawa Timur mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak Anak (KLA).

PROVINSI JAWA TIMUR
KEDUPUNDRAN TAHUN 2022
PROVINSI LAYAK ANAK TAHUN 2022
MENTERI PEMERIDAYAAN PEREMPUAN
DAN BERSILANGAN ANAK DAN ELDERLY INDONESIA

Dari 38 kab/kota terdapat 13 kab/kota yang mengalami **peningkatan** dan 3 kab/kota yang mengalami **penurunan**

Tahun 2022 terdapat :

- 1) 7 kab mendapatkan penghargaan KLA kategori **Pratama**
- 2) 17 kab/kota mendapatkan penghargaan KLA kategori **Madya**
- 3) 12 kab/kota mendapatkan penghargaan KLA kategori **Nindya**
- 4) 2 Kota mendapatkan penghargaan KLA kategori **Utama**

**PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2022
SEBAGAI PROVILA (PROVINSI LAYAK ANAK)**

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
YANG MENERIMA PENGHARGAAN KLA TAHUN 2022**

No	Kabupaten/Kota	Kategori KLA	No	Kabupaten/Kota	Kategori KLA
1	Kabupaten Lumajang	Madya	20	Kabupaten Madiun	Madya
2	Kabupaten Jember	Nindya	21	Kota Madiun	Nindya
3	Kabupaten Nganjuk	Pratama	22	Kabupaten Lamongan	Nindya
4	Kabupaten Sumenep	Madya	23	Kabupaten Pacitan	Pratama
5	Kabupaten Pasuruan	Madya	24	Kabupaten Mojokerto	Madya
6	Kabupaten Probolinggo	Pratama	25	Kota Mojokerto	Madya
7	Kabupaten Banyuwangi	Madya	26	Kabupaten Ngawi	Pratama
8	Kabupaten Tuban	Madya	27	Kabupaten Magetan	Madya
9	Kabupaten Situbondo	Nindya	28	Kota Pasuruan	Madya
10	Kabupaten Kediri	Pratama	29	Kota Batu	Nindya
11	Kabupaten Pamekasan	Madya	30	Kabupaten Gresik	Nindya
12	Kabupaten Malang	Madya	31	Kabupaten Bondowoso	Madya
13	Kota Malang	Nindya	32	Kabupaten Tulungagung	Nindya
14	Kota Probolinggo	Utama	33	Kabupaten Sidoarjo	Nindya
15	Kota Kediri	Madya	34	Kabupaten Jombang	Nindya
16	Kabupaten Blitar	Pratama	35	Kota Surabaya	Utama
17	Kota Blitar	Madya	36	Kabupaten Bangkalan	Pratama
18	Kabupaten Bojonegoro	Madya	37	Kabupaten Sampang	Pratama
19	Kabupaten Trenggalek	Nindya	38	Kabupaten Ponorogo	Madya

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh anggaran sebesar Rp. 8.023.025.438 atau 23,86 % dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,975	0,97	99,48	5.589.319.520	5.542.769.100	99,16
	2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,81	64,59*	89,94	2.433.705.918	2.406.755.143	98,89
Total				189,42			198,05
Rata-rata				94,71			99,03

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 94,71% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,03%. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh 6 Program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%

Capaian Indikator **Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur** pada tahun 2022 ditargetkan 4 lembaga yang memanfaatkan Profile Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan realisasi sebanyak 4 Perangkat Daerah tahun 2022 yang memanfaatkan Profile Kependudukan atau realisasinya sebesar 100%, dengan tingkat capaian sebesar 100%.

DP3AK Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 telah berhasil melakukan Perjanjian Kerja sama dengan 5 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kominfo, RS Syaiful Anwar, DPMTSP, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Haji, sedangkan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan akses pemanfaatan profile kependudukan hanya 4 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kominfo, RS Syaiful Anwar, DPMTSP, Dinas Sosial. Sedangkan akses Rumah Sakit Haji masih dalam proses persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2022, DP3AK telah melakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan 10 PD yaitu :

1. Biro Administrasi Kesra.
2. Dinas Kominfo
3. DPMTSP
4. RSUD Dr. Saiful Anwar
5. RSUD Soedono Madiun

6. Disnakertans.
7. Dinas Koperasi dan UMKM
8. Dinas Sosial
9. Badan Pendapatan Daerah
10. Rumah Sakit Haji

Perangkat Daerah yang telah mendapatkan akses dan memanfaatkan data kependudukan di tingkat Provinsi dan mendapat User ID, antara lain :

1. Biro Administrasi Kesra.
2. Dinas Kominfo
3. DPMTSP
4. RSUD Dr. Saiful Anwar
5. RSUD Soedono Madiun
6. Disnakertans.
7. Dinas Koperasi dan UMKM
8. Dinas Sosial

Sedangkan 1 (satu) PD yang sedang dalam proses pengajuan untuk mengakses dan memanfaatkan data kependudukan yaitu Rumah Sakit Haji, dan 1 (satu) PD masih ditindaklanjuti proses setelah PKS adalah Badan Pendapatan Daerah.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	100%

Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 100% sama dengan Tahun 2021 sebesar 100%. Ditargetkan Lembaga yang memanfaatkan Profile Kependudukan setiap tahunnya bertambah 4 lembaga.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%

Capaian Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Rp. 1.829.532.897	5,44

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.829.532.897 atau 5,44 % dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100 %	100%	100%	1.829.532.897	1.814.593.996	99,18

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 100%, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,18%.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	1,94	97,42

Catatan : Realisasi TFR tahun 2022 bersumber dari **SIPERINDU** (Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk)

Capaian Indikator **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun** pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,89 dan realisasinya sebesar 1,94 sehingga tingkat capaian sebesar 97,42%. Total Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	2,22	2,29	2,21	1,94

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Tahun 2022 sebesar 1,94 lebih rendah 0,27 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 2,21. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 1,94 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 1,94 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

Salah satu penyebab TFR menurun pada 2022, dikarenakan adanya kesadaran akan pasangan usia subur tentang pentingnya kunjungan ke fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB. Serta sudah adanya kesadaran dari pasangan usia subur yang gencar menerapkan STOP 4 T (Terlalu Muda hamil dibawah kurang dari usia 20 Tahun, Terlalu Tua untuk hamil diatas usia lebih dari 35 tahun, Terlalu deka tantara jarak kehamilan pertama dan berikutnya kurang dari 2 tahun, Terlalu sering/banyak ibu hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali).

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,94	2,21	- 0,27

Catatan : Realisasi TFR tahun 2022 bersumber dari **SIPERINDU** (Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk)

Pada Tahun 2022, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur sebesar 1,94 lebih rendah 0,27 poin dari angka Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Nasional sebesar 2,21. Indikator TFR adalah indikator dengan tingkat realisasi negatif, sehingga setiap tahun diharapkan realisasinya semakin kecil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,83	1,94	94,33

Capaian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2022 sebesar 1,94, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1,83, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 94,33%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rp. 1.330.630.000	3,96

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.330.630.000 atau 3,96% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	1,94	97,42%	1.330.630.000	1.32.338.435	99,83

Pada Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 97,42% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,83%.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga didukung oleh 3 Program yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

**Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31	82,92	100,74%

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,31 dan realisasinya sebesar 82,92, tingkat capaian sebesar 100,74%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DP3AK Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 82,92 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31	81,30	82,15	82,16	82,92

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 sebesar 82,92, lebih tinggi 0,76 poin dari tahun 2021 sebesar 82,16. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimana pada tahun 2022 sebesar 20 naik dibandingkan tahun 2021 yang capaiannya 7,2 dan Pengukuran Kinerja sebesar 25,29, meningkat 6,85 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 18,44.

**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,47	82,92	100,54%

Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2022 sebesar 82,92 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82,47, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100,54%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Rp. 17.333.754.113,-	58,10

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja didukung oleh anggaran sebesar Rp. 17.333.754.113,- atau 58,10% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,3 1	82,92	100,54	22.449.805.86 2	20.645.145.53 2	91,96%

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100,54% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,96%. Realisasi anggaran yang hanya 91,96 % disebabkan alokasi gaji dan tunjangan yang tidak terealisasi karena ada 6 ASN yang purna dan 1 ASN yang meninggal.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	33.632.994.197,00	31.737.602.206,00	94,36
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3.192.294.600,00	3.174.153.858,00	99,43
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	882.733.200,00	878.557.057,00	99,53
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	357.977.000,00	357.419.624,00	99,84
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	142.922.000,00	142.101.550,00	99,43
1.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk	320.042.200,00	318.300.583,00	99,46

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PPRG Kewenangan Provinsi			
1.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	61.792.000,00	60.735.300,00	98,29
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.259.561.400,00	2.246.863.261,00	99,44
2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang POLitik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	656.700.000,00	655.710.300,00	99,85
2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Soasial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.602.861.400,00	1.591.152.961,00	99,27
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	48.733.540,00	97,47
3.1	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	48.733.540,00	97,47
II	Program Perlindungan Perempuan	1.793.258.120,00	1.769.302.123,00	98,66
4.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	336.475.000,00	334.201.039,00	99,32
4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	186.475.000,00	184.640.994,00	99,02
4.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	149.560.045,00	99,71
5.	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	1.059.233.120,00	1.041.374.587,00	98,31
5.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	911.148.120,00	908.046.617,00	99,66

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	148.085.000,00	133.327.970,00	90,03
6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	397.550.000,00	393.726.497,00	99,04
6.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	24.781.900,00	99,13
6.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	32.000.000,00	31.922.000,00	99,76
6.3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	240.550.000,00	237.599.572,00	98,77
6.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	100.000.000,00	99.423.025,00	99,42
III	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	12.148.000,00	11.952.400,00	98,39
7.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	12.148.000,00	11.952.400,00	98,39
7.1	Pelaksanaan KOMunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	12.148.000,00	11.952.400,00	98,39
IV	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	591.618.800,00	587.360.719,00	99,28
8.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan di Tingkat Daerah Provinsi	591.618.800,00	587.360.719,00	99,28
8.1	Penyedia Data Gender dan Anak Provinsi	117.714.000,00	116.210.560,00	98,72
8.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	473.904.800,00	471.150.159,00	99,42
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.080.880.000,00	1.077.814.051,00	99,72

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
9.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	537.675.000,00	536.330.895,00	99,75
9.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan dan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	343.675.000,00	342.554.165,00	99,67
9.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	194.000.000,00	193.776.730,00	99,88
10.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga PEnyedia LAyanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	543.205.000,00	541.483.156,00	99,68
10.1	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	330.000.000,00	328.380.674,00	99,51
10.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	213.205.000,00	213.102.482,00	99,95
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	1.352.825.918,00	1.328.941.092,00	98,23
11.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	600.065.000,00	598.287.633,00	99,70
11.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	428.710.080,00	427.708.303,00	99,77
11.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	171.354.920,00	170.579.330,00	99,55
12.	Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	610.954.918,00	591.033.569,00	96,74
12.1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	358.264.918,00	348.709.239,00	97,33
12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan	193.690.000,00	183.894.630,00	94,94

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
12.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	34.000.000,00	33.462.700,00	98,42
12.4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	24.967.000,00	99,87
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	141.806.000,00	139.619.890,00	98,46
13.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	19.576.000,00	97,88
13.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	101.806.000,00	101.796.390,00	99,99
13.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	18.247.500,00	91,24
VII	Program Pendaftaran Penduduk	653.624.377,00	651.713.986,00	99,71
14.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	653.624.377,00	651.713.986,00	99,71
14.1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	273.139.347,00	272.887.500,00	99,91
14.2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	304.805.030,00	303.165.986,00	99,46
14.3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	75.680.000,00	75.660.500,00	99,97

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk			
VIII	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	880.464.630,00	869.870.670,00	98,80
15.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	314.205.300,00	311.389.000,00	99,10
15.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	28.380.000,00	28.246.000,00	99,53
15.2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten / Kota	285.825.300,00	283.143.000,00	99,06
16.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	355.040.450,00	347.585.490,00	97,90
16.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	173.470.000,00	172.096.890,00	99,21
16.2	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	181.570.450,00	175.488.600,00	96,65
17.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	211.218.880,00	210.896.180,00	99,85
17.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	211.218.880,00	210.896.180,00	99,85
IX	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	295.443.890,00	293.009.340,00	99,18
18.	Penyediaan Profil Kependudukan	295.443.890,00	293.009.340,00	99,18
18.1	Penyedia Data Kependudukan Provinsi	47.300.000,00	46.712.000,00	98,76
18.2	Penyusun Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain	248.143.890,00	246.297.340,00	99,26
X	Program Pengendalian Penduduk	599.835.000,00	598.328.143,00	99,75

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
19.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	599.835.000,00	598.328.143,00	99,75
19.1	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	387.319.000,00	386.790.953,00	99,86
19.2	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	212.516.000,00	211.537.190,00	99,54
XI	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	270.895.000,00	270.549.102,00	99,87
20.	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	270.895.000,00	270.549.102,00	99,87
20.1	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	212.455.000,00	212.176.102,00	99,87
20.2	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	58.440.000,00	58.373.000,00	99,89
XII	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	459.900.000,00	459.461.190,00	99,90
21.	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	275.492.163,00	275.173.060,00	99,88
21.1	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	104.430.594,00	104.242.100,00	99,82
21.2	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	171.061.569,00	170.930.960,00	99,92
22.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	184.407.837,00	184.288.130,00	99,94

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
22.1	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	184.407.837,00	184.288.130,00	99,94
XIII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.449.805.862,00	20.645.145.532,00	91,96
23.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.373.503,00	615.088.031,00	99,63
23.1	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	390.312.000,00	388.647.924,00	99,57
23.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.140.000,00	6.136.000,00	99,93
23.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.640.000,00	6.640.000,00	100,00
23.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.980.000,00	4.884.000,00	98,07
23.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.916.884,00	4.906.000,00	99,78
23.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.722.539,00	93.679.750,00	99,95
23.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.662.080,00	110.194.357,00	99,58
24.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.718.159.050,00	16.064.541.170,00	90,67
24.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	16.808.218.000,00	15.167.293.420,00	90,24
24.2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556.974.000,00	547.830.000,00	98,36
24.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	260.723.702,00	257.283.750,00	98,68
24.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.880.000,00	44.860.000,00	99,96

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
24.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.510.065,00	8.510.000,00	100,00
24.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.120.245,00	9.053.000,00	99,26
24.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	24.647.615,00	24.626.400,00	99,91
24.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.085.423,00	5.084.600,00	99,98
25.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.396.372,00	309.893.600,00	97,33
25.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.305.372,00	18.255.600,00	78,33
25.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	94.189.000,00	93.893.200,00	99,69
25.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	169.844.000,00	167.622.300,00	98,69
25.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.058.000,00	30.122.500,00	96,99
26.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.051.551.228,00	1.022.190.687,00	97,21
26.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.147.371,00	18.959.910,00	99,02
26.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	379.672.416,00	356.551.270,00	93,91
26.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.084.156,00	108.616.919,00	96,91
26.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.141.785,00	100.107.333,00	98,98
26.5	Penyediaan Bahan/ Material	257.500,00	-	-
26.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.665.000,00	43.310.989,00	99,19
26.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.583.000,00	394.644.266,00	99,76
27.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.503.781.415,00	1.430.405.346,00	95,12
27.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	527.020.315,00	487.528.351,00	92,51
27.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	976.761.100,00	942.876.995,00	96,53
28.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.164.044.294,00	1.126.618.698,00	96,78
28.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	206.902.530,00	178.559.460,00	86,30

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
28.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.900.000,00	102.860.000,00	99,96
28.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.900.000,00	29.733.000,00	96,22
28.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	789.180.668,00	781.455.223,00	99,02
28.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.161.096,00	34.011.015,00	99,56
29.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	76.500.000,00	76.408.000,00	99,88
29.1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	76.500.000,00	76.408.000,00	99,88
JUMLAH BELANJA DAERAH		33.632.994.197,00	31.737.602.206,00	94,36

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp. 33.632.994.197,-, terealisasi sebesar Rp. 31.737.602.206,- atau 94,36%.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi atas Realisasi Perjanjian Kinerja yang disusun;
2. Melakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan dan ditargetkan;
3. Meningkatkan kembali komitmen pimpinan sebagai penggerak implementasi akuntabilitas kinerja;
4. Pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
5. Menyusun Cascading Kinerja dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta menyusun penganggaran berbasis kinerja;
6. Casecading kinerja diselaraskan dengan peta proses bisnis.

BAB IV PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran dapat dicapai dengan hasil baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak mendapat predikat nilai **Baik**, dengan rata-rata capaian sebesar **94,71%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 2 (dua) Indikator Sasaran.
- SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan administrasi kependudukan mendapat predikat nilai **Baik**, dengan capaian sebesar **100%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator Sasaran.
- SASARAN 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga dengan kategori nilai **Baik**, dengan capaian sebesar **97,42%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.
- SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan kategori nilai **Sangat Baik**, dengan capaian sebesar **100,74%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi di masa mendatang, DP3AK Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah optimalisasi, melalui :

1. Peningkatan peran mitra organisasi dalam penurunan stunting dan pernikahan usia anak;
2. pemutakhiran biodata penduduk;
3. Orientasi Kesehatan Reproduksi dan peningkatan kepesertaan ber KB;
4. Penguatan penyusunan integrasi gender melalui anggaran responsive gender, peningkatan kemampuan SDM dalam PUG, penguatan kelembagaan PUG dan integrasi pentahelix;
5. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak dengan melibatkan Lintas Sektor sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak Anak;
6. Penguatan kelembagaan jejaring dalam rangka pencegahan kekerasan perempuan serta peningkatan pelayanan perempuan korban kekerasan;
7. Peningkatan kapasitas perempuan kader politik dan pengembangan produktifitas ekonomi perempuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2023

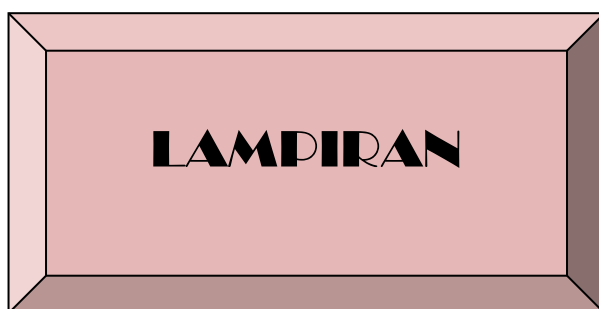
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661117 199103 2 008



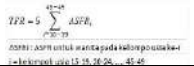
i. FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

- TUJUAN** : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
- TUGAS** : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI				TARGET KINERJA	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokiskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. 1/3 (Ipar + IDM + Iinc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dis = Indeks distribusi pendapatan	73,04	73,03	72,36	72,36 (2021)	71,77	72,17
							71-74*	71-74*

Catatan : *) pada target IDG, berdasarkan rancangan akhir perubahan kedua Renstra tahun 2019-2024

SASARAN		DEFINISI OPEASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI			TARGET KINERJA			PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender	Indeks Pengarusutamaan Gender dihitung berdasarkan pencapaian terhadap 7 Prasyarat Gender	-	0,93	0,97	0,95	0,96	0,97	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.614.750.000	2.614.750.000	2.614.750.000
						0,975*	0,977*	0,979*	Program Perlindungan Perempuan	2.163.000.000	2.163.000.000	2.163.000.000
									Program Peningkatan Kualitas Keluarga	125.250.000	125.250.000	125.250.000
									Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	320.000.000	320.000.000	320.000.000
	Indeks Perlindungan Anak	IPA merupakan presentasi dari capaian pembangunan perlindungan anak Indonesia yang memuat Klaster I-V, yaitu : - Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan - Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif - Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan - Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya - Klaster V Perlindungan Khusus $IPA = \sum_{j=1}^k (W_j \times Indeks K_j)$ <small>Indeks $K_j = \left(\frac{R_j}{N_j}\right) \times 100$ Indeks K_j : nilai Indeks Klaster ke- R_j : nilai Indikator ke-j pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi N_j : kemampuan indikator pada klaster ke-j</small>	71,80	72,25	64,59	71,81	71,85	71,90	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000
					71,81*	72,50*	72,75*	Program Perlindungan Khusus Anak	1.215.000.000	1.215.000.000	1.215.000.000	
Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Jumlah PD Prov Jatim yang memanfaatkan Profil Kependudukan Prov Jatim Jumlah PD Prov Jatim x100%		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	Program Pendaftaran Penduduk	510.000.000	510.000.000	510.000.000
									Program Pencatatan sipil	0	0	0
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	510.000.000	510.000.000	510.000.000

SASARAN		DEFINISI OPEASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI			TARGET KINERJA			PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
									Program Pengelolaan profil Kependudukan	420.000.000	420.000.000	420.000.000
Meningkatnya pengendalian penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	<p>Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburanya</p> <p>Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran</p>  <p>ASFR : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-kelompok usia 15-19, 20-24, ... 45-49</p>	2,28	2,29	2,21	1,89	1,86	1,83	Program Pengendalian Penduduk	639.105.000	639.105.000	639.105.000
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	310.895.000	310.895.000	310.895.000
									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	<p>Evaluasi implementasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p> <p>Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Pencapaian Kinerja 	81,30	82,15	82,16	82,31	82,39	82,47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.580.482.000	23.151.889.000	23.556.582.000

Catatan : *) pada target IDG dan IPA , berdasarkan rancangan akhir perubahan kedua Renstra tahun 2019-2024

ii. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**


Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1.	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	a. Indeks Pengarusutamaan Gender	0,975	Proses Bisnis, Penerima layanan Penerima Layanan
		b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,81	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	a. Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	Proses Bisnis
3.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	Proses Bisnis
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31	Anggaran, Penguatan Internal

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	22.449.805.862,00	P-APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	3.192.294.600,00	P-APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	1.636.783.120,00	P-APBD
		Rp.	156.475.000,00	DAK-NF
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	12.148.000,00	P-APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	591.618.800,00	P-APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	1.080.880.000,00	P-APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	1.057.500.918,00	P-APBD
		Rp.	295.325.000,00	DAK-NF

8.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	650.791.580,00	P-APBD
		Rp.	2.832.797,00	DAK-NF
9.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	880.464.630,00	P-APBD
10.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	295.443.890,00	P-APBD
11.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	599.835.000,00	P-APBD
12.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	270.895.000,00	P-APBD
13.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	459.900.000,00	P-APBD
	Jumlah	Rp.	33.632.994.197,00	


Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

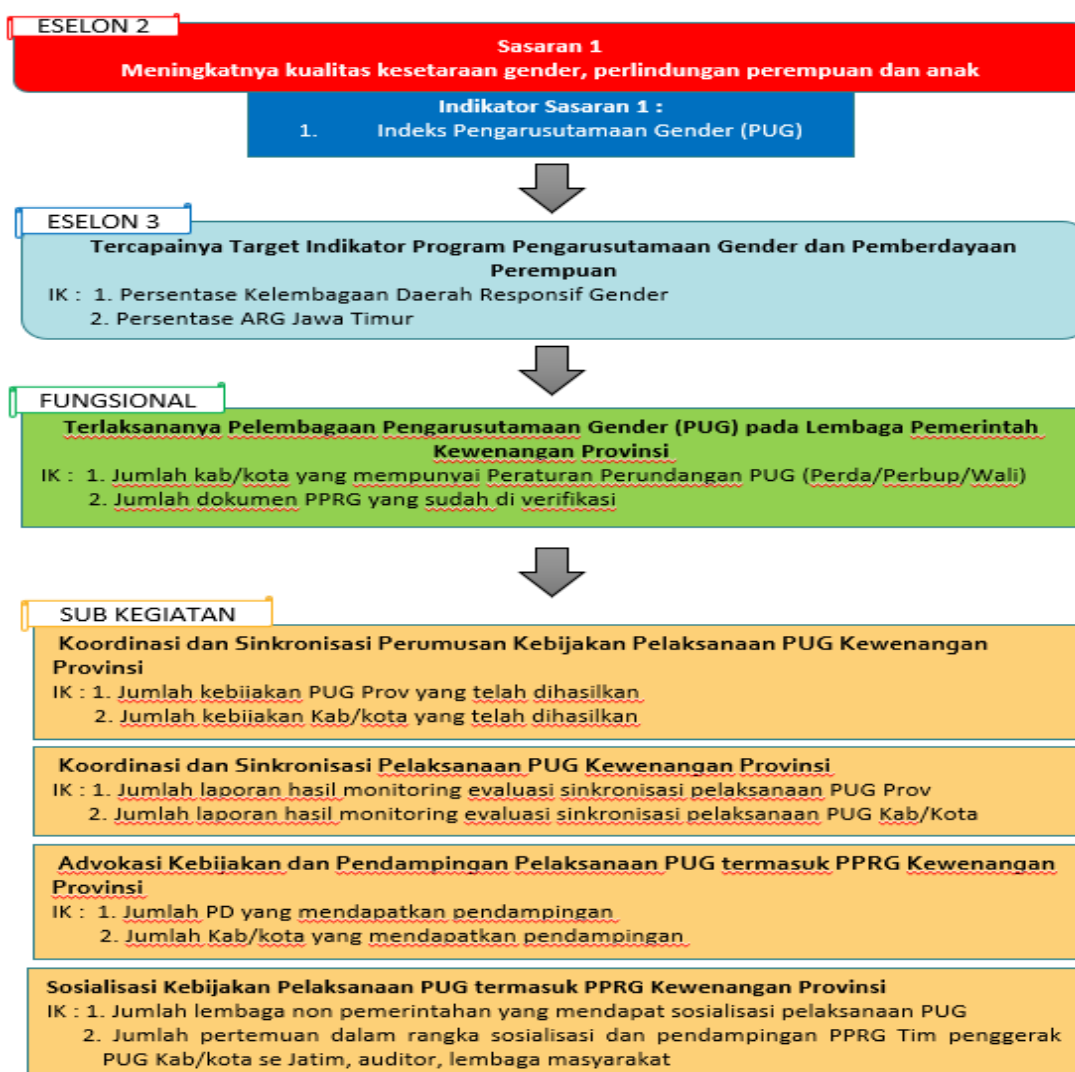

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661117 199103 2 008

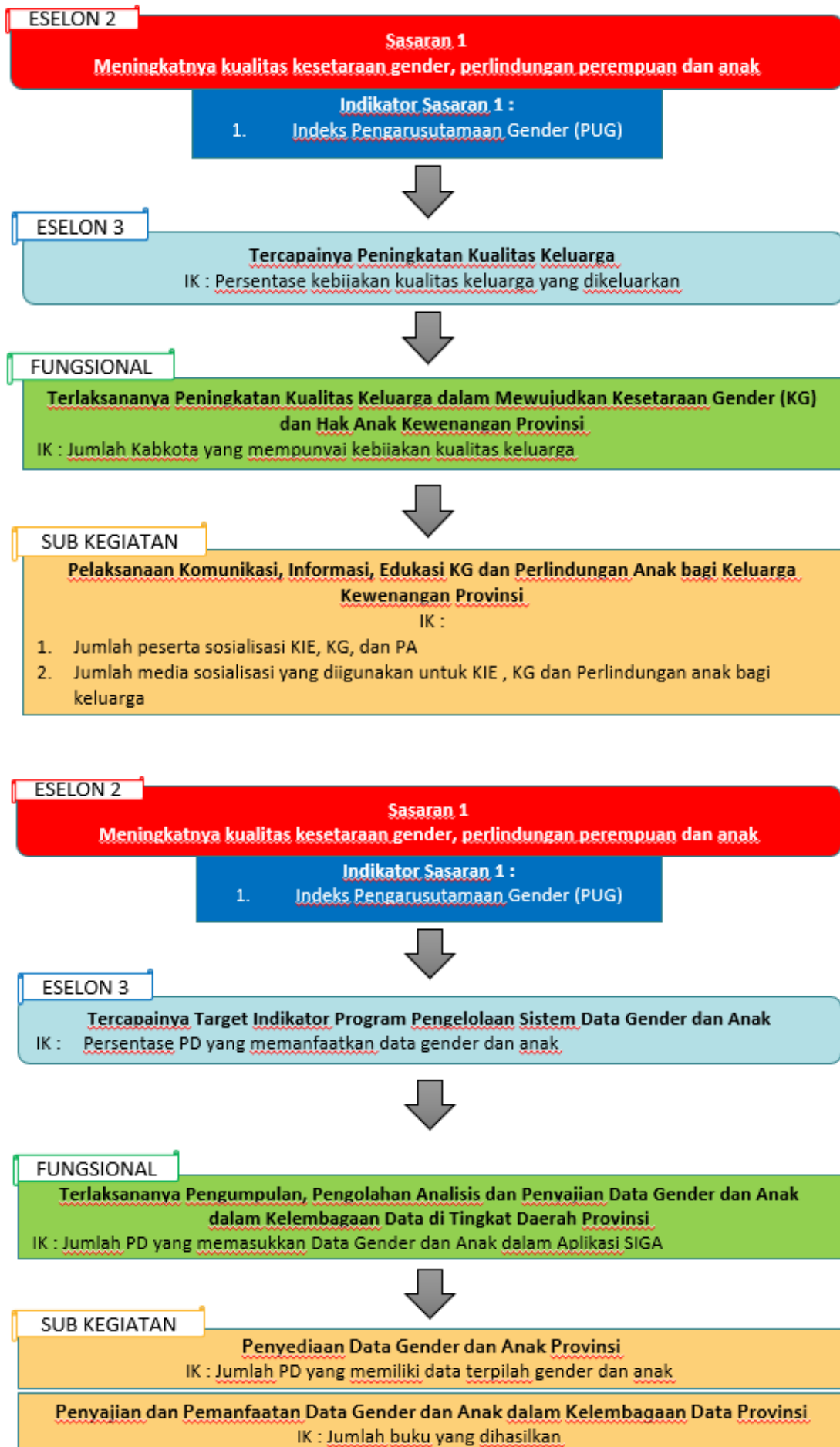
iii. REKAPITULASI DATA

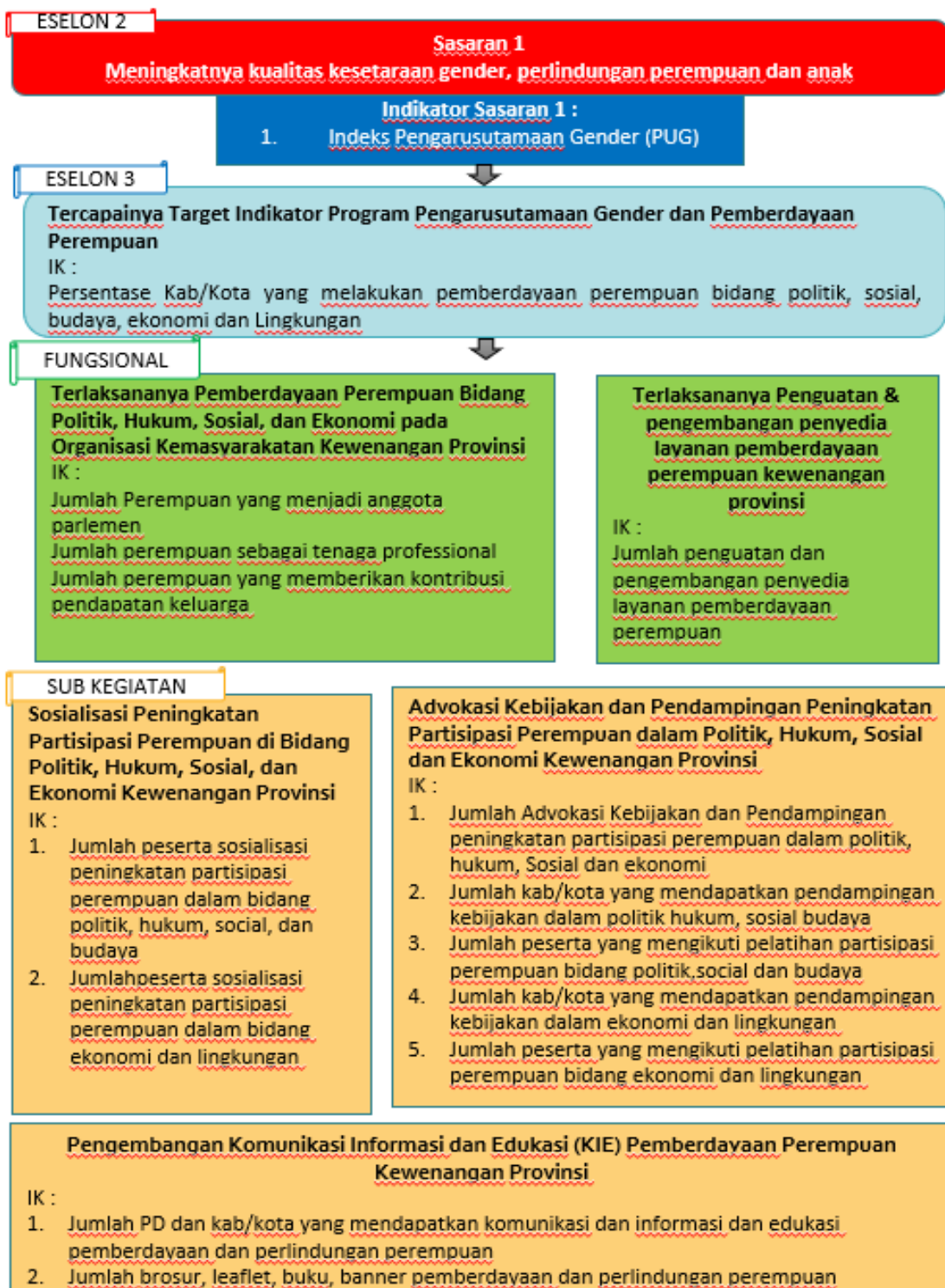
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi				Capaian Tahun 2022
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tujuan: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71-74	73,04	73,03	72,36	72,36*	97,78-101,91%
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indek Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,975	-	0,94	0,97	0,97*	99,49%
		Indek Perlindungan Anak (IPA)	71,81	71,80	72,25	64,59	64,59*	89,95%
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	2,22	2,29	2,21	1,94	97,42%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,31	81,30	82,15	82,16	82,92	100,74%

*Catatan : *) Realisasi tahun 2022 adalah Data Tahun 2021*

iv. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD 2019-2024)







ESELON 2

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :

1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Perempuan

IK : Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah kerjasama penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan para pihak penyedia layanan

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang tertangani

Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan dan TPPO terhadap perempuan

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah PD/Kab/Kota yang mempunyai sarana prasarana layanan perempuan korban kekerasan yang sesuai dengan SOP

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM Penyedia Layanan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah peserta Advokasi kebijakan layanan perlindungan perempuan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

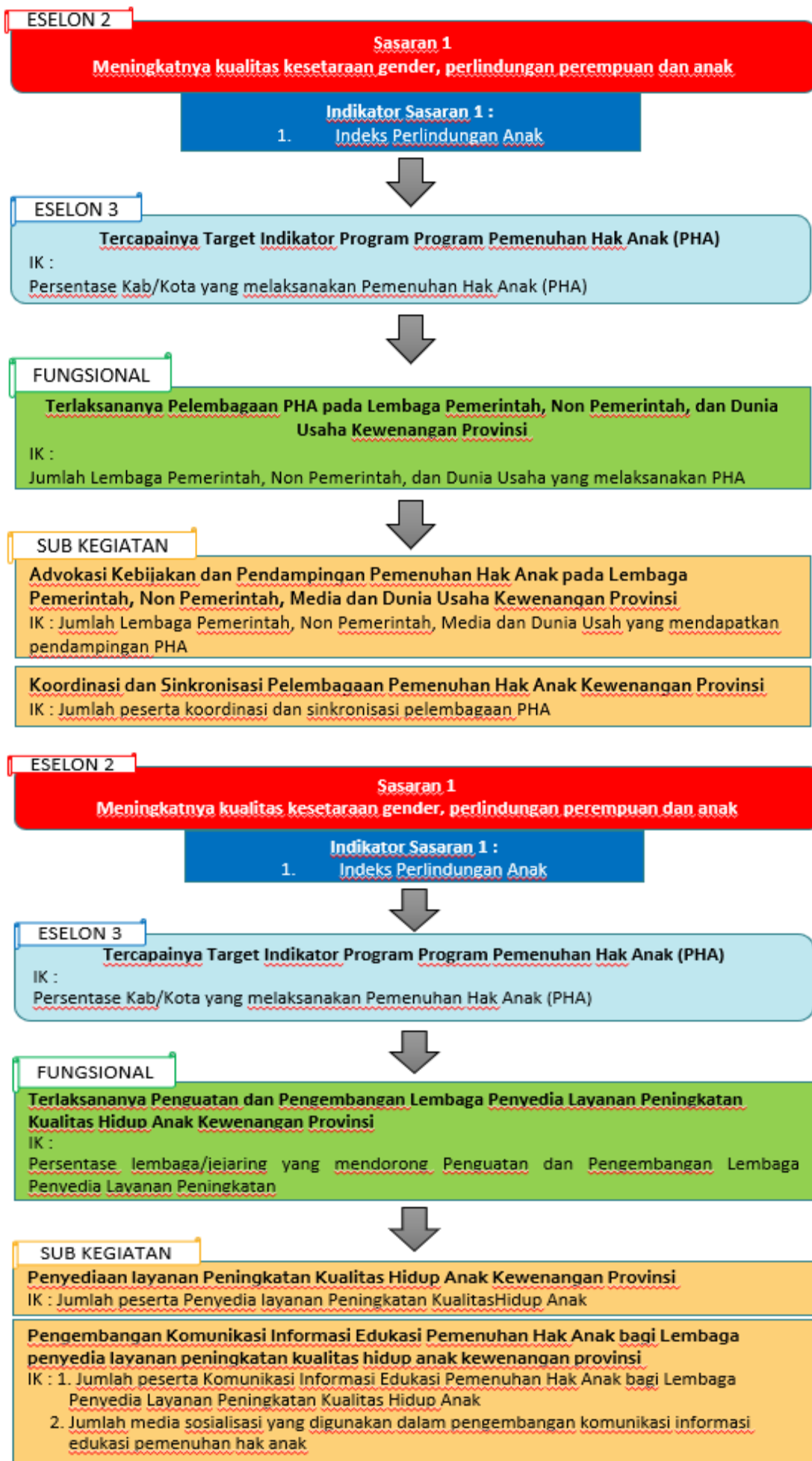
IK : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah kebutuhan spesifik yang tercukupi bagi perempuan
Jumlah pelatihan spesifik perempuan yang terlaksana

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah peserta penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan



ESELON 2

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :
1. Indeks Perlindungan Anak

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Khusus Anak
IK :
Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak
Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara konferensif

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK :
Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
IK : Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan peneaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Terlaksananya Penguatan dan Penoembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK :
Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak

SUB KEGIATAN

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak
Jumlah kab/kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak

Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
IK : Jumlah jenis layanan yang tersedia

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah jenis layanan yang tersedia

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi IK : Jumlah sarpras yang sudah tersedia (UPT PPA Provinsi)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta sosialisasi terkait KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus
Jumlah media social yang dihasilkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi IK : Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM
Jumlah sarpras kab/kota yang sudah terdata

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
IK : Jumlah jejaring / lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi IK : Jumlah jejaring penyedia layanan anak yang aktif

ESELON 2

Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :
Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Pendaftaran Penduduk

IK :
Persentase Perekaman KTP Elektronik
Persentase kartu Identitas Anak (KIA)

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

IK :
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan pendaftaran kependudukan sesuai standar

SUB KEGIATAN

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional

IK : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional
Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan system administrasi kependudukan

Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

IK : Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah kab/koya yang mengikuti peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk se jawa timur

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk

IK : Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur

ESELON 2

Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :
Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

IK : Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)

FUNGSIONAL

Tertlaksananya Penataan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

IK : Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan Adminduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Penugalan NIK sesuai Standar

Tertlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

IK : Tersedianya Database Perorangan yang dapat dimanfaatkan OPD/Lembaga Masyarakat berbadan hukum yang telah mendapat Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan

Tertlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

IK : Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data

SUB KEGIATAN

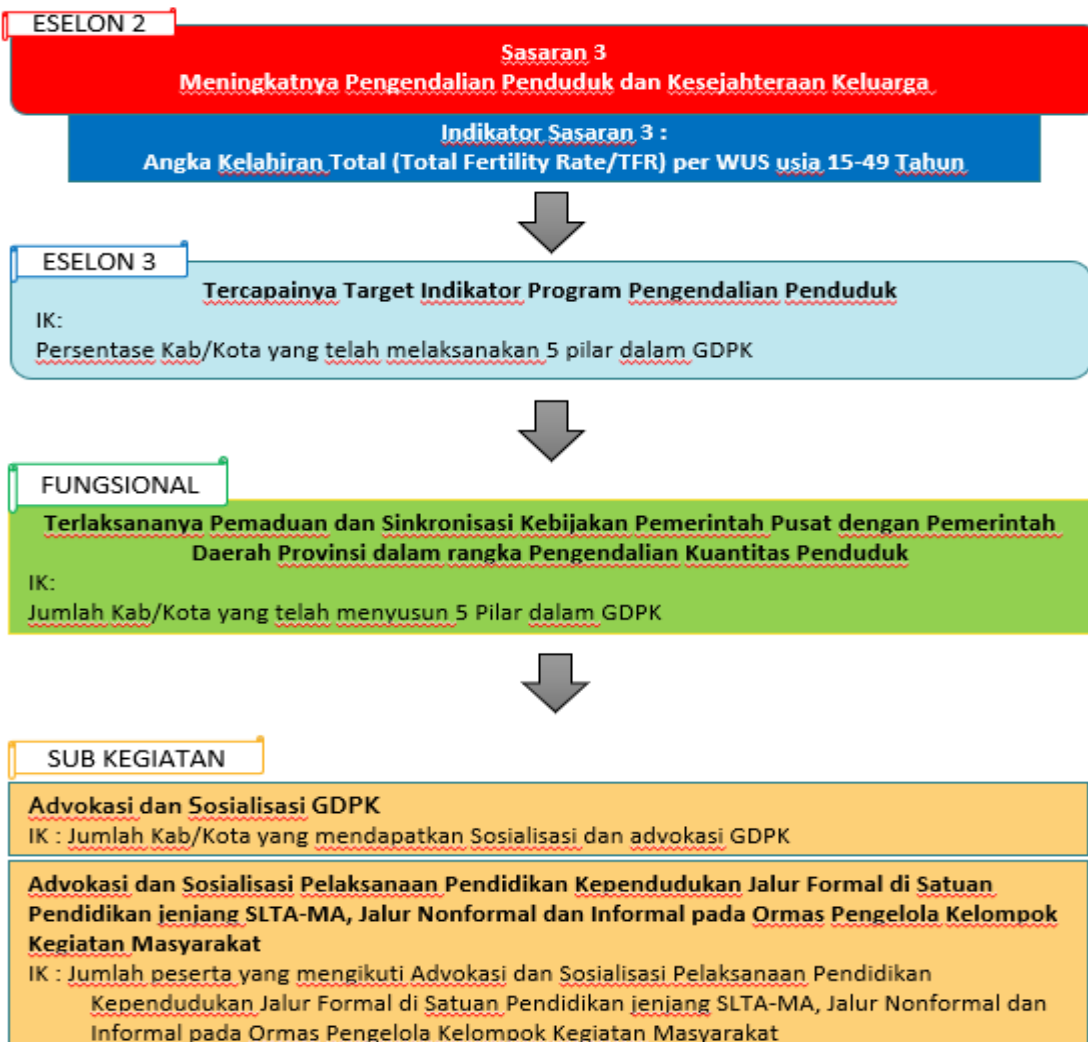
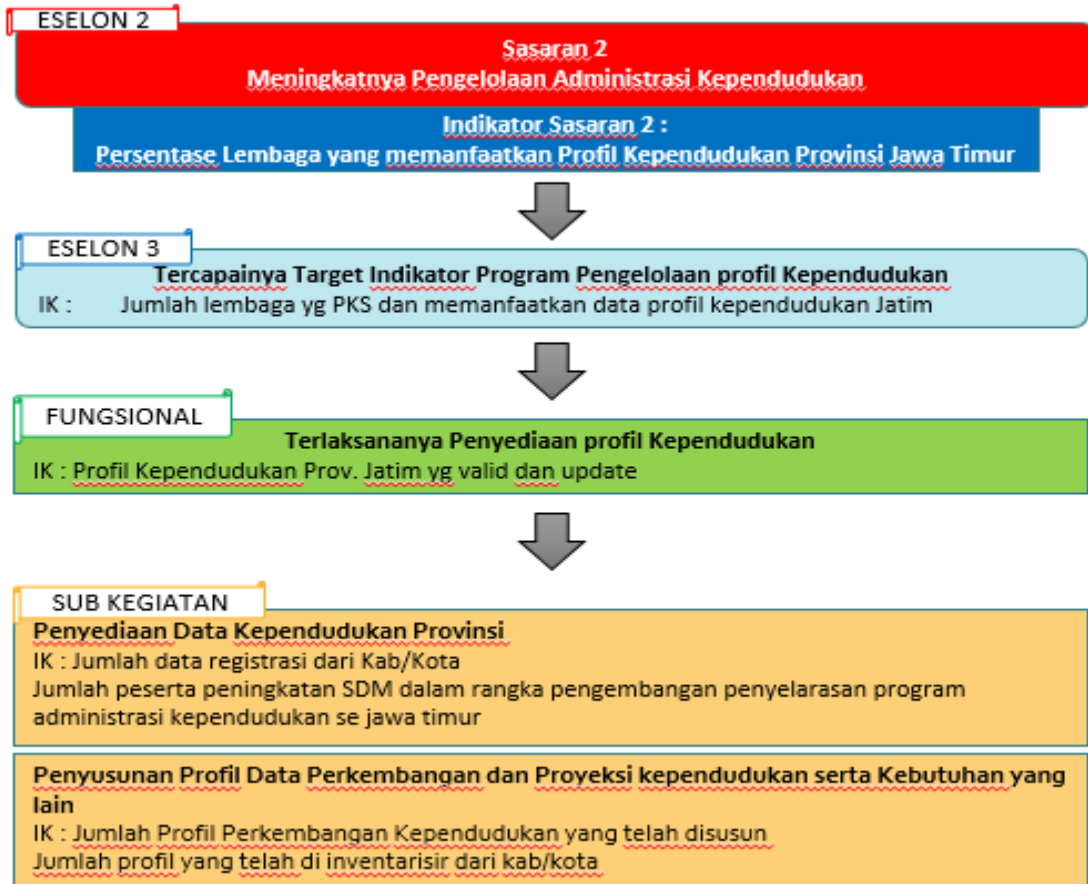
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah peserta peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur

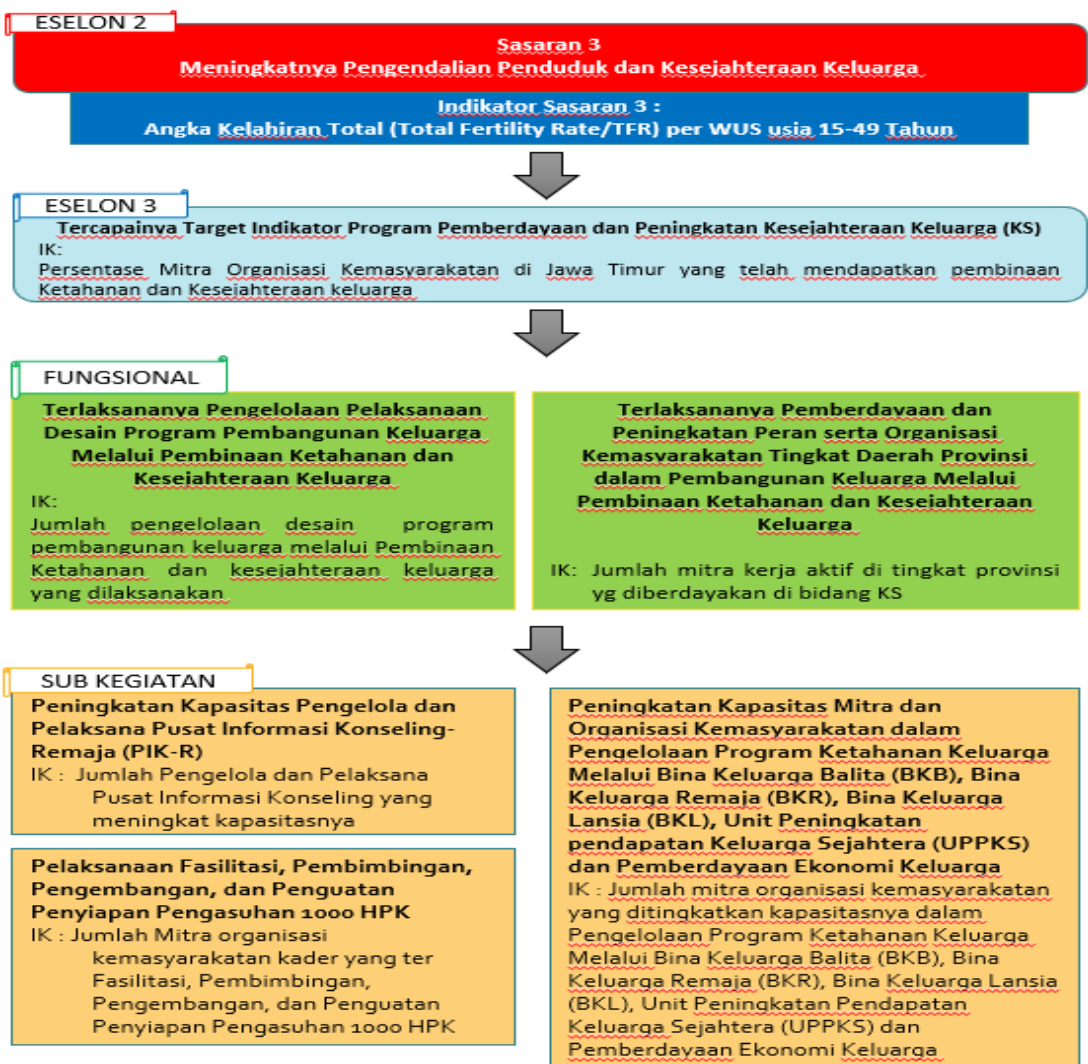
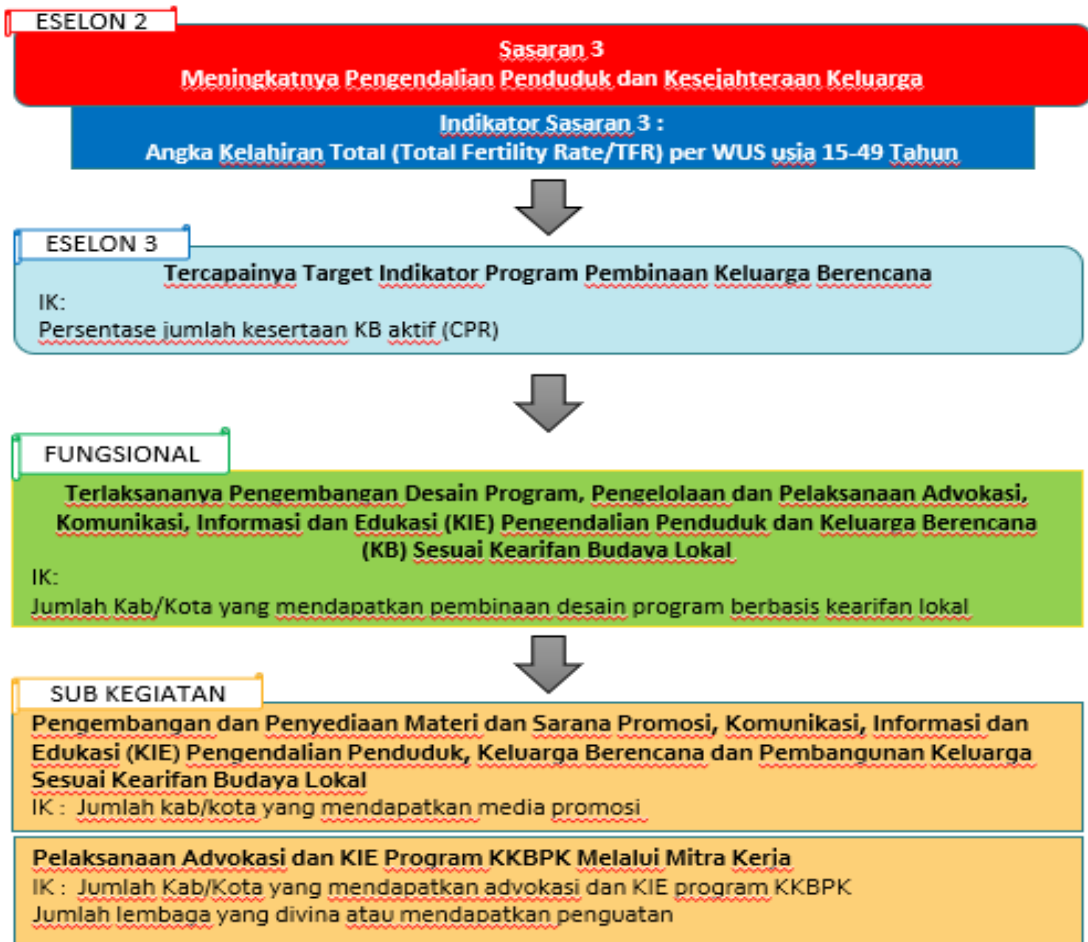
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Aoregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
IK : Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota

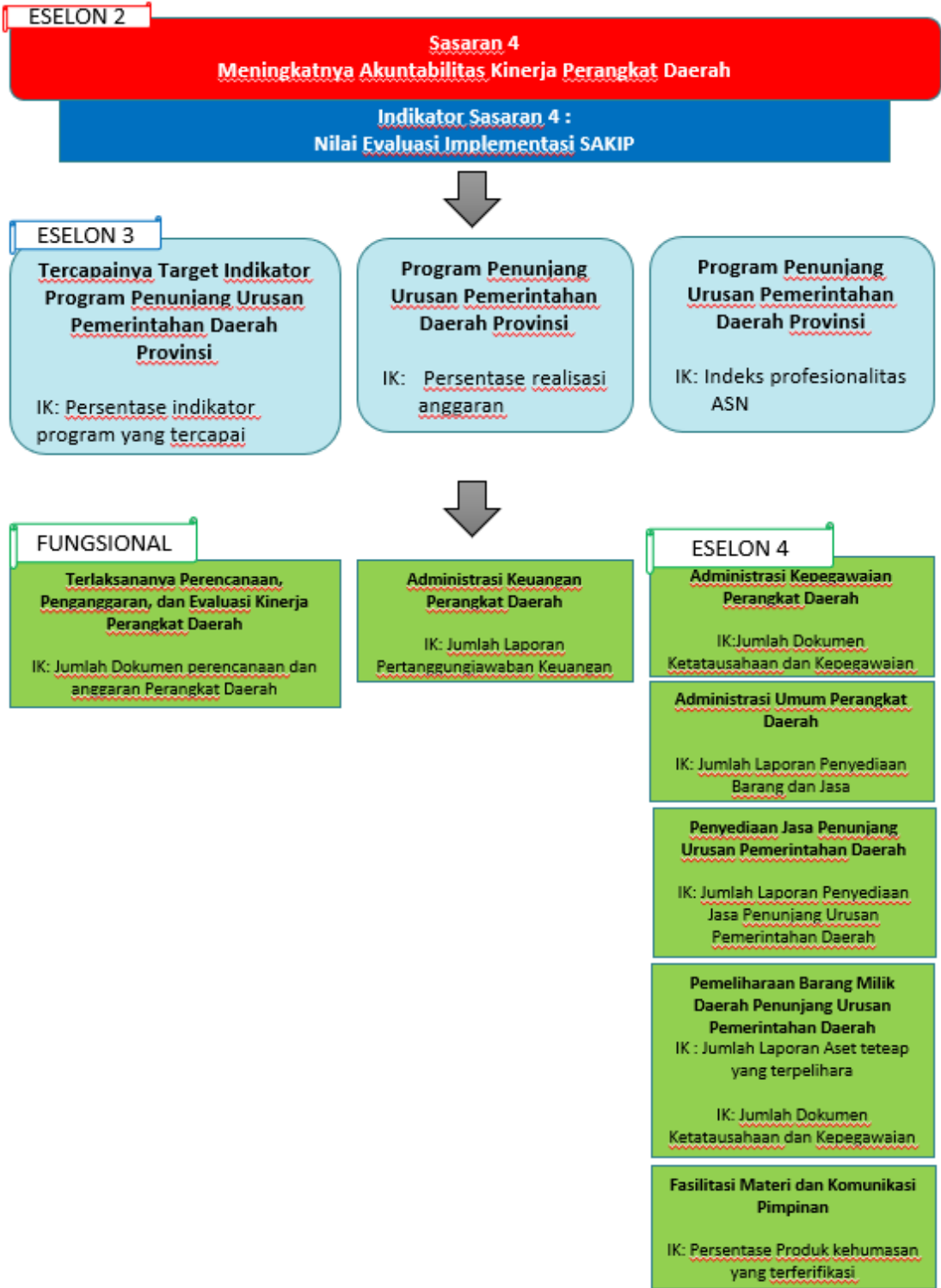
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
IK : Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletin kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan

Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah OPD, Lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang memanfaatkan Data Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh pusat







Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
IK : Jumlah dokumen DPA perubahan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
IK : Jumlah dokumen RKA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK : Jumlah dokumen capaian kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK Jumlah dokumen perubahan RKA

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen evaluasi kinerja

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
IK : Jumlah dokumen DPA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : jumlah dokumen keuangan SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK : jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
IK : Jumlah dokumen tanggapan atas LHP

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah laporan verifikasi penatausahaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK : Jumlah laporan keuangan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
IK : jumlah laporan akuntansi perangkat daerah

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
IK : jumlah laporan prognosis

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
IK : jumlah pengadaan pakaian dinas

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
IK : jumlah laporan SKP

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
IK : jumlah laporan data pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
IK : jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK: Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Bahan/Material
IK : jumlah paket pengadaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
IK : jumlah paket pengadaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : jumlah laporan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : jumlah jasa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah Laporan Aset tetap yang terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
IK : jumlah jasa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung, kantor dan bangunan lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
IK : jumlah pemeliharaan aset tak berwujud

Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
IK: Persentase Produk kehumasan yang terferifikasi

Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
IK : jumlah hasil olah konten dokumentasi kegiatan kepala dinas

V. PETA PROSES BISNIS



URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LEVEL 0

MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MASYARAKAT

LEVEL 1

PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

LEVEL 2

PEMBINAAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI

PENGUATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA

MANAJEMEN RESIKO

MASALAH:

PERTUMBUHAN PENDUDUK TIDAK TERKENDALI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN:

SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENYUSUNAN GDPK 5 PILAR PADA KABUPATEN/KOTA YANG BELUM MENYUSUN

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LEVEL 0

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

LEVEL 1

PENINGKATAN KUALITAS DATABASE KEPENDUDUKAN

LEVEL 2

PENDAFTARAN PENDUDUK

PENCATATAN SIPIL

PIAK
(PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

PROFIL DATA KEPENDUDUKAN

MANAJEMEN RESIKO

MASALAH:

TIDAK SEMUA LEMBAGA MEMANFAATKAN PROFIL KEPENDUDUKAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN:

SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEPADA OPD DAN LEMBAGA BADAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN